



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NON-VORTE MASYARAKAT  
KELURAHAN BELAKANG TANGSI PAD PEMILUKADA PROVINSI  
SUMATRA BARAT**

**SKRIPSI**



**AGUNG GUNANDRA  
06193053**

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

## ABSTRAK

**Agung Gunandra, 06193053**, Skripsi dengan judul Faktor-Faktor Penyebab *Non-Voter* Masyarakat di Kelurahan Belakang Tangsi Pada Pemiluakada Provinsi Tahun 2010. **Sebagai Pembimbing I Drs. Agus Budiono, MS dan Pembimbing II Andri Rusta, S.IP, M.PP.** Skripsi ini terdiri dari 108 halaman dengan 13 referensi buku, 1 jurnal, 2 Undang-undang dan peraturan lainnya.

Pada pelaksanaan pemiluakada Gubernur Sumatera Barat tahun 2010 yang telah diselenggarakan muncul berbagai permasalahan setelah pelaksanaan pemiluakada, salah satunya adalah rendahnya partisipasi politik masyarakat, ini disebabkan oleh banyaknya jumlah pemilih yang terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya atau lebih umum dikenal dengan istilah golongan putih atau *non-voter*.

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang yaitu pada Kelurahan Belakang Tangsi. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik dengan menggunakan variabel faktor penyebab *non-voter*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe *descriptive*. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan teknik wawancara langsung terhadap responden (*face to face interview*). Responden dipilih dengan teknik *Random Sampling*. Selanjutnya dalam analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS dengan analisis data secara deskriptif.

Dari hasil analisis data peneliti menemukan bahwa 71% responden tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemiluakada Gubernur. Berdasarkan dari hasil penelitian ini ternyata terlihat bahwa faktor penyebab *non-voter* tersebut disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sebanyak 29% responden terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dengan kondisi adanya pekerjaan yang lebih penting dan responden yang memang tidak ingin memilih. Namun pada penelitian ini tidak menggali secara lebih dalam mengenai penyebab banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, karena pada penelitian ini peneliti hanya mendeskripsikan mengenai faktor penyebab *non-voter* masyarakat pada Pemiluakada Gubernur tahun 2010.

Kata Kunci: *Partisipasi Politik, perilaku tidak memilih, faktor penyebab non voter, pemiluakada Gubernur.*

## ABSTRACT

**Agung Gunandra, 06193053**, Thesis entitled Factors Contributing to Non-Voter society in Kelurahan Belakang Tangsi On Election Province in 2010. As a **mentor I Drs. Agus Budiono, MS** and **mentor II Andri Rusta, S. IP, M.PP.** This thesis consists of 108 pages with 13 reference books, 1 journal, 2 the Act and other regulations. In the implementation of the election year 2010 West Sumatra Governor who has held a variety of problems emerged after the implementation of the election, one of which is low political participation of the community, is caused by the large number of registered voters who do not use their voting rights or, more commonly known as white or non-class voters.

The research was conducted in the city of Padang is on Kelurahan Belakang Tangsi. This study uses the theory of political participation by using the variable factors of non-voters. The approach used is a quantitative approach to the type descriptive. Data were collected using a questionnaire by direct interview technique of respondents (face to face interview). Respondents were selected by Random Sampling technique. Furthermore, in the data analysis performed using SPSS computer program with a descriptive data analysis.

From the results of data analysis the researchers found that 71% of respondents are not registered in the voters list, this is what causes people could not use their right to vote in the election of Governor. Based on the results of this study was shown that the factors causing non-voters was caused by a number of people who are not registered in the voters list (DPT). Some 29% of respondents enrolled in the DPT will but do not use their voting rights to the conditions of employment are more important and respondents who did not want to choose. However in this study did not delve more deeply about the cause of many people who are not registered in the voters list, because in this study researchers only describe the factors causing the non-voters in the General Election Governors in 2010.

*Keywords: Political Participation, the behavior of non-voters, the factors causing non-voters, election of Governor.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam teruntuk Nabi Besar Muhamad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S1) Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.

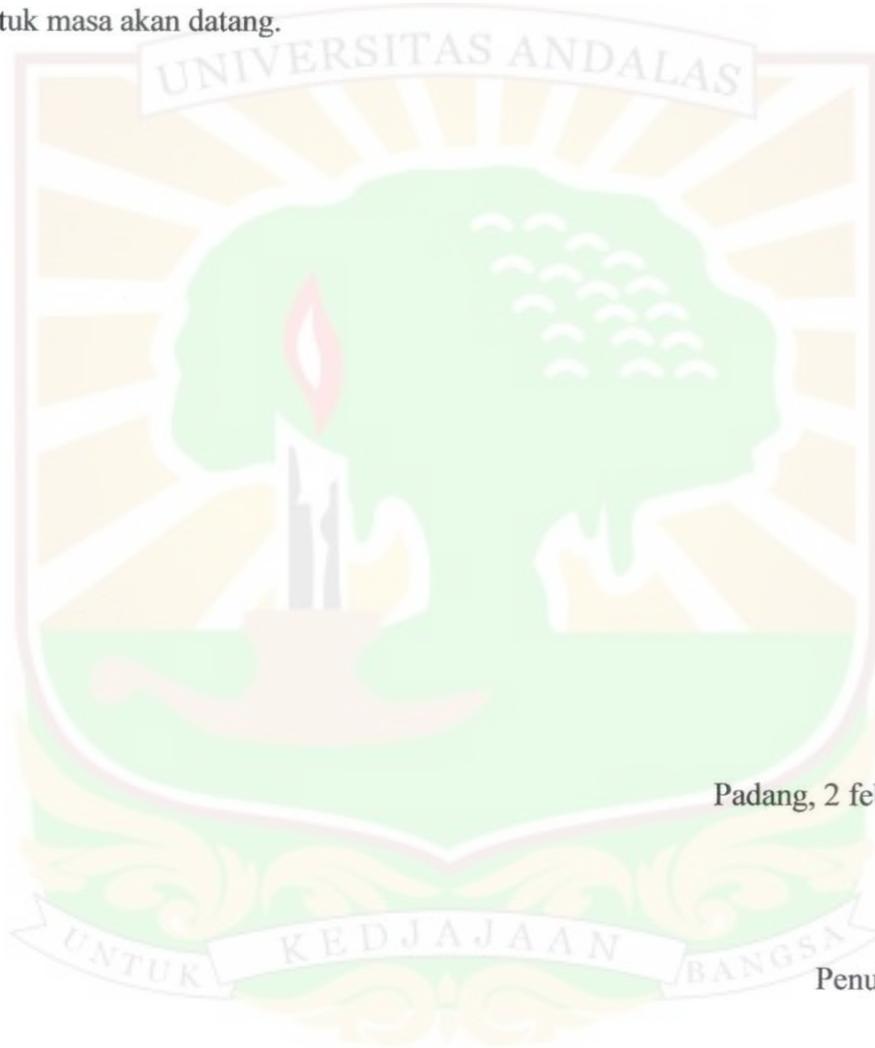
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan, bimbingan pengalaman dan ilmu pengetahuan sangat bermanfaat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Drs. Alfitri, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas.
2. Bapak Drs. Agus Budiono, MS. Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam kesibukannya dan banyak memberikan nasehat, masukan dan bimbingannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu pak.
3. Bapak Andri Rusta, S.IP, M.PP. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan meluangkan waktunya untuk penulis walaupun beliau sering sibuk sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Syaiful, M.SI, Ibu Tengku Rika Valentina, S.IP, MA, Bapak Drs. Tamrin, M.SI, Ibu Irawati, S.IP, MA sebagai penguji skripsi penulis yang telah memberikan masukan, kritikan serta saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas Padang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat besar artinya bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Giro Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, terimakasih untuk bantuannya dalam mengurus segala keperluan Administrasi, buat Uni Lis terimakasih atas kemudahan dan do'anya juga. Terutama buat Uni sil, terimakasih atas kemudahan dan kesabarannya yang sangat banyak membantu dalam mengurus keperluan-keperluan penulis dan juga untuk Uni Meri dan Uni Ta.
7. KPUD Sumbar dan KPUD Kota Padang yang telah membantu memberikan data-data untuk keperluan penulisan skripsi.
8. Kecamatan Padang Barat dan Kelurahan Belakang Tangsi yang telah memberikan izin penelitian dan data-data untuk keperluan penulisan skripsi ini. Dan kepada seluruh masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai bagi yang menjadi responden dalam penelitian ini.
9. Pengurus Labor Jurusan Ilmu Politik. Terimakasih atas bantuannya dalam peminjaman buku selama penulisan skripsi
10. Teman-teman, sahabat dan seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak telah menjadi bagian dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran untuk skripsi ini akan penulis terima dengan berlapang dada dan rasa hormat

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan untuk masa akan datang.



Padang, 2 februari 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	12
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b>	
2.1 Tinjauan Kepustakaan .....	13
2.1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	13
2.2 Teori dan Kepustakaan konseptual .....	17
2.2.1 Partisipasi Politik .....	17
2.2.2 Prilaku Tidak Memilih (Non Voter) .....	21
2.3 Konstruksi Model Teoritis .....	33
2.4 Model Analisis .....	34
2.5 Defenisi Operasional dan Indikator .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	36
3.2 Lokasi (Subjek) Penelitian .....	37
3.3 Populasi dan Sampel .....	37
3.4 Unit analisis .....	42
3.5 Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	42
3.6 Validitas dan reabilitas .....	43

3.7 Analisis Data .....	44
3.8 Struktur Penulisan .....	45
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Deskripsi Umum Kota Padang .....	48
4.2 Kecamatan dan Kelurahan .....	49
<b>BAB V TEMUAN DAN DESKRIPSI DATA</b>	
5.1 Karakteristik Responden .....	52
<b>BAB VI ANALISIS DAN INTREPERTASI DATA</b>	
6.1 Hubungan Faktor-Faktor Penyebab Non-Voter Masyarakat Pada Pemilukada Gubernur Tahun 2010 .....	68
<b>BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
7.1 Kesimpulan.....	73
7.2 Saran.....	75



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Persentase Suara Hasil pemilukada.....	4
Tabel 1.2 Daftar Pengguna Hak Pilih Pilkada Gubernur Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005.....	6
Tabel 1.3 Daftar Pengguna Hak Pilih Pemilukada Gubernur Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010.....	7
Tabel 1.4 Daftar Pengguna Hak Pilih Pilkada Gubernur Kota Padang 2005 .....	8
Tabel 1.5 Daftar Pengguna Hak Pilih Pemilukada Gubernur Kota Padang 2010 .....	8
Tabel 1.6 Daftar Pengguna Hak Pilih Pemilukada Gubernur Kelurahan di Kecamatan Padang Barat Tahun 2010 .....	9
Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 2.2 Tabel Defenisi Operasional dan Indikator .....	35
Tabel 3.1 Tabel Pemilihan Responden.....	41
Tabel 4.1 Tabel Hasil Pemilukada Kota Padang.....	50
Tabel 6.1 Tabel Faktor Utama Yang Menyebabkan Masyarakat tidak menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilukada Gubernur Tahun 2010.....	69

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Teknik Pengambilan Sampel .....	41
---	----

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Umur Responden .....	53
Grafik 5.2 Jenis Kelamin Responden.....	54
Grafik 5.3 Agama Responden .....	55
Grafik 5.3 Suku Bangsa Responden.....	56
Grafik 5.4 Status Perkawinan Responden .....	57
Grafik 5.5 Tempat Tinggal Responden .....	58
Grafik 5.6 Apakah Tidak Ikut Memilih Karena Tidak terdaftar .....	59
Grafik 5.7 Apakah Tidak Ikut Memilih Karena Tidak Tahu Adanya Pemilukada..	60
Grafik 5.8 Apakah Tidak ikut Karena Para Calon Gubernur Tidak Ada Yang Layak Menjadi Pemimpin .....	61
Grafik 5.9 Penilaian Tentang manfaat memilih .....	62
Grafik 5.10 Apakah Tidak Ikut memilih Karena Calon Yang Akan Dipilih Tidak Ada Yang Disukai.....	63
Grafik 5.11 Apakah Tidak Ikut Memilih Karena Memang Tidak Ingin Memilih ...	64
Grafik 5.12 Apakah Tidak ikut Memilih Karena Pada Saat Pemilihan Dalam Keadaan Sakit.....	65
Grafik 5.13 Apakah Tidak ikut Memilih Karena Ada Pekerjaan Lain Yang Lebih Penting.....	66
Grafik 5.14 Apakah Tidak Ikut Memilih Karena Pada Saat Pemilihan Sedang di Luar Kota .....	67

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dilaksanakan pada tahun 2004 merupakan pemilu yang ke-9 dalam sejarah Negara Republik Indonesia, dalam pelaksanaannya mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sistem pemilu 2004 diatur melalui paket undang-undang politik yaitu UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-Pusat), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian undang-undang tersebut direvisi lagi menjadi UU No.2 tahun 2004.<sup>1</sup>

Dalam UU No. 12 tahun 2003 ini terdapat beberapa penekanan yang berbeda dari pelaksanaan pemilu sebelumnya yaitu<sup>2</sup>, *Pertama* untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD berlaku “sistem proporsional dengan daftar terbuka” dengan cara mencoblos tanda gambar partai politik dan 1 (satu) nama calon dari partai tersebut, sedangkan untuk pemilihan anggota DPD berlaku “sistem distrik berwakil banyak” dengan cara mencoblos nama calon anggota DPD. *Kedua* diperkenalkannya sistem pemilihan langsung oleh rakyat. *Ketiga* adanya lembaga DPD sebagai salah satu kamar dari sistem parlemen dua kamar. *Keempat* keberadaan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai penyelenggara pemilu yang

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, No. 37

<sup>2</sup> Syamsuddin Haris, *Pemilu dan Kesiapan Masyarakat Sipil*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “*Kesiapan Masyarakat Sipil Menyongsong Pemilu 2004*” diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Bukittinggi, Sumbar tanggal 16 Oktober 2003

relatif independen dibandingkan dengan KPU dalam pemilu sebelumnya. *Kelima* adanya keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam struktur badan legislatif.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, hal ini diatur melalui Pasal 18 UUD 1945, Ayat (4) :

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dan UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Sedangkan untuk pelaksanaan teknis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selanjutnya Pilkada mengalami perubahan dengan disahkannya UU mengenai Pilukada yang tertuang ke dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2005 terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008. UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, PP No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah yang telah diubah terakhir dengan PP No. 49 tahun 2008 (tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah).

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilukada meliputi : Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan pengalaman sejarah, ada empat periode Pemilihan Kepala Daerah<sup>3</sup>, *periode pertama*, yaitu periode UU No.22/1948 dan UU No.1/1957, ketika berlakunya sistem parlementer yang liberal, pada saat ini sebelum dan sesudah pemilu 1955 tidak ada partai politik yang menjadi mayoritas tunggal, sehingga pemerintah pusat yang dipimpin oleh Perdana Menteri adalah hasil koalisi partai, hal ini berdampak pada pemilihan kepala daerah yang juga merupakan hasil koalisi antara fraksi-fraksi yang ada di DPRD. *Periode kedua*, yaitu periode Penetapan Presiden (Penpres) No.6 UU No.18/1956 yang lebih dikenal dengan era Dekrit Presiden, saat diterapkannya demokrasi terpimpin, dan UU No. 5/1974, dikenal sebagai era Demokrasi Pancasila. Pemilihan kepala daerah pada kedua periode ini memiliki kesamaan, yaitu calon kepala daerah dipilih oleh DPRD dan kemudian dari calon yang dipilih itu akan ditentukan kepala daerahnya oleh Presiden. *Periode ketiga*, yaitu periode berlakunya UU No.22/1999 pada saat ini kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sedangkan pada *periode keempat*, melalui UU 32 tahun 2004 pemilihan kepala daerah berubah menjadi sistem pemilihan langsung oleh rakyat.

---

<sup>3</sup> S.H.Sarundajang, 2005, *Pilkada Langsung Problema dan Prospek*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka, hal 13

Dengan sistem yang berbeda ini sangat diharapkan dapat mendatangkan suasana baru dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia termasuk di masyarakat Sumatera Barat khususnya. Masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya ke TPS-TPS untuk memilih Kepala Daerah tanpa harus memakai istilah “membeli kucing dalam karung lagi”.

Pemilukada Gubernur tahun 2010 yang dilaksanakan di Sumatera Barat diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu :

**Tabel 1.1**  
**NAMA CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PERSENTASE SUARA HASIL PEMILUKADA**

Nama calon Gubernur dan Wakil	Partai Koalisi	Suara
Irwan Prayitno dan Muslim Kasim	PKS, HANURA, PBR	32,44 % suara
Marlis Rahman dan Aristo Munandar	GOLKAR	26,22 % suara
Endang Irzal dan Asrul Syukur	DEMOKRAT, GERINDRA	20,54 % suara
Fauzi Bahar dan Yohannes Dahlan	PAN, PPP	16,28 % suara
Ediwarma dan Husni Hadi	24 (dua puluh empat) partai kecil tergabung dalam koalisi partai maju bersama	4,25 % suara

Sumber : KPUD Kota Padang, 2010

Hasil akhir dari pemilihan tersebut mengukuhkan pasangan Irwan Prayitno dan Muslim Kasim sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.

Dalam pemilukada fenomena baru yang muncul dan pantas untuk di khawatirkan adalah masalah rendahnya pemilih yang menggunakan hak pilihnya (*turn out*). Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (*non-voter*) mencapai angka 30% bahkan ada daerah yang mencapai angka sampai dengan 50%. Dalam sejarah politik Indonesia, keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum (*voter-turnout*) sangat besar, hal ini terlihat mulai dari pemilihan umum tahun

1955 yaitu 86% dan pada tahun 1999 menunjukkan angka yang hampir sama 85,7%<sup>4</sup>.

Di Indonesia orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut dengan istilah golongan putih (golput), istilah golput muncul pada tahun 1970-an yang mengacu pada sikap dan tindakan politik untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu Orde Baru karena dinilai tidak demokratis, yaitu dengan cara tetap datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tetapi menusuk lebih dari satu tanda gambar atau menusuk bagian putih dari kartu suara. Mungkin karena cara menusuk bagian putih inilah akhirnya mereka yang tidak berpartisipasi dalam pemilu disebut sebagai golongan putih (golput)<sup>5</sup>. Kemudian istilah golput menjadi istilah yang umum dipakai sebagai sebutan untuk setiap orang yang tidak ikut memilih dalam pemilihan umum.

Apabila dilihat dari persentase penghitungan suara dari pemilihan kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia maka sesungguhnya suara terbanyak adalah untuk *non-voter*. Fenomena kemenangan *non-voter* inilah yang banyak mewarnai pelaksanaan pemilihan kepala daerah di sepanjang tahun 2005 lalu. Karena tingginya angka *non-voter* ini maka tak heran M. Fajroel Rachman<sup>6</sup> yang dikenal sebagai aktivis golput menyebutkan bahwa golput merupakan suatu kesatuan yang terstruktur seperti sebuah partai politik peserta pemilu.

Begitupula dengan Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut terlihat dengan hasil pemilukada Gubernur pada tahun 2005 dan selanjutnya terjadi juga dengan

---

<sup>4</sup> IDEA International menghitung voter turnout nasional dalam pemilihan umum 1999 dari total suara yang sah dibagi total warga negara yang punya hak pilih (110,298/128,717=85,69%). <http://www.idea.int/vt/country-view.efm>

<sup>5</sup> Arbi Sanit, 1992. *Aneka Pandangan Fanomena Golput*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hal.39.

<sup>6</sup> <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=644>

pemilukada Gubernur tahun 2010. Hasil persentase angka *non-voter* yang terjadi di Sumatera Barat dapat dilihat dengan tabel yang ada di bawah ini dan data *non-voter* ini selanjutnya akan melihat komparasi angka *non-voter* pemilukada Gubernur tahun 2005 dan pemilukada Gubernur tahun 2010.

**Tabel 1.2**  
**DAFTAR PENGGUNAAN HAK PILIH PILKADA GUBERNUR**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005**

NO	KABUPATEN KOTA	PEMILIH TERDAFTAR	PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH	TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	% MENGGUNAKAN HAK PILIH	% TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
1	Kabupaten Pasaman	149,038	108,482	40,556	72.79 %	27.21 %
2	Kabupaten Pasaman Barat	201,467	142,867	58,600	70.91 %	29.09 %
3	Kabupaten Agam	274,454	174,382	100,072	63.54 %	36.46 %
4	Kabupaten 50 Kota	222,074	165,308	56,766	74.44 %	25.56 %
5	Kabupaten Tanah Datar	218,210	138,615	79,595	63.52 %	36.48 %
6	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	113,461	72,123	41,338	63.57 %	36.43 %
7	Kabupaten Damasraya	106,914	79,055	27,859	73.94 %	26.06 %
8	Kabupaten Pesisir Selatan	258,347	151,938	106,409	58.81 %	41.19 %
9	Kabupaten Solok	211,640	149,544	62,096	70.66 %	29.34 %
10	Kabupaten Solok Selatan	84,952	59,796	25,156	70.39 %	29.61 %
11	Kabupaten Padang Pariaman	239,562	149,202	90,360	62.28 %	37.72 %
12	Kabupaten Kep. Mentawai	40,016	28,348	11,668	70.84 %	29.16 %
13	Kota Bukittinggi	71,876	38,810	33,066	54.00 %	46.00 %
14	Kota Padang Panjang	26,461	15,460	11,001	58.43 %	41.57 %
15	Kota Padang	538,102	279,864	258,238	52.01 %	47.99 %
16	Kota Solok	37,476	23,443	14,033	62.55 %	37.45 %
17	Kota Sawahlunto	35,633	23,283	12,350	65.34 %	34.66 %
18	Kota Payakumbuh	67,189	43,969	23,220	65.44 %	34.56 %
19	Kota Pariaman	48,837	30,059	18,778	61.55 %	38.45 %
<b>TOTAL</b>		<b>2,945,709</b>	<b>1,874,548</b>	<b>1,071,161</b>		

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat, 2005

**Tabel 1.3**  
**DAFTAR PENGGUNAAN HAK PILIH PEMILUKADA GUBERNUR**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

NO	KABUPATEN KOTA	PEMILIH TERDAFTAR	PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH	TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	% MENGGUNAKAN HAK PILIH	% TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
1	Kota Pariaman	57.715	30.385	27.326	52.66%	47.34%
2	Kota Padang	553.819	299.986	253.833	54.16%	45.84%
3	Kota Sawahlunto	41.541	22.632	18.909	54.48%	45.52%
4	Kota Payakumbuh	79.269	44.162	35.107	55.72%	44.28%
5	Kota Padang Panjang	31.259	17.910	13.349	57.29%	42.71%
6	Kabupaten Agam	313.562	183.121	130.441	58.40%	41.60%
7	Kota Bukittinggi	70.359	43.212	27.147	61.41%	38.59%
8	Kabupaten Tanah Datar	247.841	154.618	93.223	62.38%	37.62%
9	Kabupaten Padang Pariaman	262.652	166.391	96.261	63.35%	36.65%
10	Kabupaten 50 Kota	248.332	158.191	90.141	63.70%	36.30%
11	Kabupaten Kep. Mentawai	47.112	30.119	16.993	63.93%	36.07%
12	Kabupaten Solok	245.766	158.900	86.866	64.65%	35.35%
13	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	134.980	90.391	44.589	66.96%	33.04%
14	Kota Solok	41.819	28.552	13.267	68.27%	31.73%
15	Kabupaten Pesisir Selatan	297.592	206.011	91.581	69.22%	30.78%
16	Kabupaten Pasaman Barat	238.295	166.673	71.622	69.94%	30.06%
17	Kabupaten Solok Selatan	102.428	74.121	28.307	72.36%	27.64%
18	Kabupaten Damasraya	133.026	99.966	33.060	75.14%	24.86%
19	Kabupaten Pasaman	172.086	134.524	37.562	78.17%	21.83%
<b>TOTAL</b>		<b>3.277.681</b>	<b>2.109.865</b>	<b>1.167.816</b>		

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat, 2010

Dari data di atas dapat diambil perbandingan bahwa Kota Padang pada pemilukada Gubernur tahun 2005 merupakan daerah yang memiliki angka *non-voter* paling tinggi (47,99%), selanjutnya pada pemilukada Gubernur tahun 2010 Kota Padang memiliki angka *non-voter* tertinggi nomor 2 (dua) yaitu (45,84%). Disini terlihat bahwa Kota Padang selalu memiliki angka *non-voter* yang tinggi dalam pemilukada Gubernur tahun 2005 dan pemilukada Gubernur 2010.

**Tabel 1.4**  
**DAFTAR PENGGUNAAN HAK PILIH PILKADA GUBERNUR**  
**KOTA PADANG TAHUN 2005**

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR	PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH	TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	% MENGGUNAKAN HAK PILIH	% TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
1	Padang Barat	45,007	19,020	25,987	42.26 %	57.74 %
2	Padang Utara	51,465	20,683	30,782	40.19 %	59.81%
3	Padang Timur	56,554	29,183	27,371	51.60 %	48.40 %
4	Padang Selatan	41,667	20,340	21,327	48.82 %	51.18%
5	Bungus Teluk Kabung	13,915	8,439	5,476	60.65 %	39.35 %
6	Koto Tengah	93,550	48,891	44,659	52.26 %	47.74 %
7	Nanggalo	37,909	19,660	18,249	51.86 %	48.14 %
8	Lubuk Kilangan	27,303	16,152	11,151	59.16 %	40.84 %
9	Lubuk Begalung	64,363	37,969	26,394	58.99 %	41.01 %
10	Kuranji	72,397	40,755	31,642	56.29 %	43.71 %
11	Pauh	33,972	18,772	15,200	55.26 %	44.74 %
<b>TOTAL</b>		<b>538,102</b>	<b>279,864</b>	<b>258,238</b>		

Sumber : KPUD Kota Padang, Juli 2005

**Tabel 1.5**  
**DAFTAR PENGGUNAAN HAK PILIH PEMILUKADA GUBERNUR**  
**KOTA PADANG TAHUN 2010**

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR	PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH	TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	% MENGGUNAKAN HAK PILIH	% TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
1	Padang Barat	34.739	17.410	17.329	50.12%	49.88%
2	Padang Utara	38.165	19.753	18.412	51.75%	48.25%
3	Padang Timur	55.753	28.886	26.867	51.81%	48.19%
4	Padang Selatan	42.143	22.201	19.942	52.68%	47.32%
5	Bungus Teluk Kabung	14.659	9.189	5.470	62.68%	37.32%
6	Koto Tengah	109.816	59.624	50.192	54.29%	45.71%
7	Nanggalo	37.652	20.362	17.290	54.07%	45.93%
8	Lubuk Kilangan	32.376	17.932	14.444	55.38%	44.62%
9	Lubuk Begalung	70.557	40.210	30.347	56.98%	43.02%
10	Kuranji	82.018	45.416	36.602	55.37%	44.63%
11	Pauh	25.941	19.003	16.938	73.25%	26.75%
<b>TOTAL</b>		<b>553.819</b>	<b>299.986</b>	<b>253.833</b>		

Sumber : KPUD Kota Padang, Juli 2010

Dari data Kecamatan, tabel diatas memperlihatkan penggunaan hak pilih di Kota Padang secara lebih terperinci dapat dilihat bahwa *non-voter* tertinggi pada pemilukada Gubernur tahun 2005 adalah di kecamatan Padang Utara yaitu 59,81 %, sedangkan pada Pemilukada Gubernur tahun 2010 bahwa *non-voter* tertinggi adalah di kecamatan Padang Barat yaitu 49,88 % hampir dari setengah pemilih tetap yang terdaftar.

**Tabel 1.6**  
**DAFTAR PENGGUNAAN HAK PILIH PEMILUKADA GUBERNUR KELURAHAN DI**  
**KECAMATAN PADANG BARAT TAHUN 2010**

NO	KELURAHAN	DAFTAR PEMILIH TETAP	PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH	TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	% MENGGUNAKAN HAK PILIH	% TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
1	Flamboyan Baru	3.020	1.698	1.322	56.23%	43.77%
2	Rimbo Kaluang	2.558	1.398	1.160	54.66%	45.34%
3	Ujung Gurun	3.122	1.829	1.293	58.59%	41.41%
4	Purus	4.531	2.702	1.829	59.64%	40.36%
5	Padang Pasir	3.206	1.631	1.575	50.88%	49.12%
6	Olo	3.933	2.023	1.910	51.44%	48.56%
7	Kampung Jao	3.051	1.443	1.608	47.30%	52.70%
8	Belakang Tangsi	2.499	960	1.539	38.42%	61.58%
9	Kampung Pondok	4.088	1.714	2.374	41.93%	58.07%
10	Berok Nipah	4.731	20.12	2.719	42.53%	57.47%
<b>TOTAL</b>		34.739	17.410	17.329		

Dari data Kelurahan diatas terlihat bahwa kelurahan yang memiliki persentase tertinggi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada Gubernur tahun 2010 adalah masyarakat Kelurahan Belakang Tangsi. Dari data yang diperoleh disana terlihat sebanyak 61,58% masyarakatnya tidak menggunakan hak pilih.

Dari data lain yang diperoleh peneliti di lapangan bahwasanya di Kelurahan Belakang Tangsi ternyata masyarakatnya sebagian besar tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) oleh karena itu mereka tidak bisa menggunakan

hak pilihnya dalam pemilukada Gubernur tahun 2010, daftar pemilih tetap yang ada di Kelurahan Belakang Tangsi memiliki daftar nama-nama masyarakat yang bukan terdaftar dalam nama-nama masyarakat Belakang tangsi. Hal ini dikarenakan bahwa nama-nama dalam DPT tersebut sudah tidak ada lagi disebabkan ada yang sudah meninggal dan sudah banyak nama-nama tersebut tidak lagi berdomisili di Kelurahan Belakang Tangsi.

Sikap warga Kota Padang untuk tidak menggunakan hak suaranya dapat dilihat dari pendapat yang dituangkan oleh pakar politik, sebagai contohnya. Dalam literatur Ilmu Politik para ahli banyak menggunakan konsep kepercayaan politik untuk menjelaskan keaktifan atau ketidakaktifan (*inactivity*) seseorang dalam dunia politik. Ketidakaktifan diinterpretasikan sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau ekspresi atas perasaan keteresaingan (*alienasi*). Penelitian A.Gamson menjelaskan bahwa dalam perilaku *non-voter*, kepercayaan pada sistem politik yang ada dapat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih. Salah satu alasan pemilih tidak hadir dalam pemilu karena mereka cukup puas dengan keadaan yang ada. Ketidakhadiran dalam pemilu merupakan pertanda kepercayaan pada sistem politik yang ada.

Sikap yang terjadi di dalam masyarakat Kota Padang untuk tidak menggunakan hak suaranya diperkirakan karena faktor krisis kepercayaan terhadap calon pemimpinnya. Proses pemilukada biasanya didahului dengan adanya kampanye untuk mempresentasikan visi dan misi kepada masyarakat. Tim sukses tidak hanya akan memakai cara yang elegan dalam kampanye akan tetapi akan

menggunakan cara-cara kotor untuk menjatuhkan lawan politiknya seperti kampanye hitam, hal inilah yang dirasa menjadi penyebab semakin meningkatnya krisis kepercayaan terhadap calon pemimpin. Faktor lain yang dianggap menjadikan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilukada adalah lemahnya KPUD dalam mengolah data secara cermat terhadap data pemilih tetap. Golput seperti telah merusak suatu tatanan proses dalam demokrasi dan jauh dari itu tindakan untuk golput akan mengerucut kepada ketidakpercayaan terhadap demokrasi itu sendiri.

Kota Padang merupakan Ibu Kota provinsi Sumatera Barat yang sering disebut-sebut sebagai barometer politik Sumatera Barat dimana tingkat pendidikan dan kesejahteraan cukup tinggi, arus informasi serta fasilitas pendidikan pun lengkap dan serba dekat. Akan tetapi Kota Padang menjadi salah satu tempat angka golput yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dalam pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selanjutnya dengan kemudahan-kemudahan seperti itu seharusnya warga Kota Padang bisa menjadi masyarakat yang memiliki angka *non-voter* yang rendah dan bisa meminimalisir faktor penyebab *non-voter* tersebut, sebaliknya dengan kemudahan yang sudah ada di Kota Padang seperti transportasi yang lancar, tingkat pendidikan dan kesejahteraan cukup tinggi, arus informasi serta fasilitas kesehatan pun lengkap dan serba dekat lah yang seolah-olah menjadikan masyarakat Kota Padang sebagai suatu wilayah yang memiliki tingkat angka *non-voter* yang tinggi di Provinsi Sumatera Barat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti mengajukan permasalahan pokok berikut :

Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan *non-voter* di Kelurahan Belakang Tangsi pada pemilukada Gubernur tahun 2010 di Kota Padang ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan penyebab terjadinya *non-voter* dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada) tahun 2010 di Kota Padang.

### 1.3.2 Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita mengapa sebahagian besar masyarakat Kota Padang khususnya daerah Kecamatan Padang Barat tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah 2010
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi bagi instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap hasil pemilu.

## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN PENGUKURAN

#### 2.1 Tinjauan Kepustakaan

##### 2.1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Danny Try Putra, penelitian yang dilakukannya berjudul *Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2008*. Dalam penelitian ini Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang telah dilaksanakan pada tanggal 23 oktober partisipasi 2008. Berbagai permasalahan muncul setelah pelaksanaan pilkada, salah satunya adalah rendahnya partisipasi politik masyarakat, ini disebabkan oleh besarnya jumlah pemilih yang terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya atau lebih umum dikenal dengan istilah golput.

Peneliti dalam penelitian ini yaitu Danny Try Putra Dalam penelitian ini ingin menjelaskan faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) Walikota Padang Tahun 2008 dan menganalisis faktor-faktor penyebab tersebut. Penelitian sangat penting dan sangat menarik dilakukan mengingat dari waktu ke waktu angka golput semakin tinggi di Indonesia.

Pencarian data dalam penelitiannya ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian *eksploratif*. Proses pengambilan data menggunakan teknik wawancara dan juga analisis terhadap *literature* dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara bersifat mendalam (*indepth*

*interview*) dan terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan terdiri dari informan kunci yaitu *non-voter* di kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Lubuk Begalung dengan teknik *accidental sampling* yang kebetulan dilakukan apabila pemilihan anggota sampelnya terhadap orang atau benda yang kebetulan ada atau dijumpai sedangkan informan lain sebagai pelengkap data primer yang diperoleh dari informan kunci terdiri dari anggota KPUD Kota Padang dan PPK Kecamatan yang dipilih secara *purposive sampling*.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa alasan bahwa alasan informan tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2008 adalah : Malas, tidak ada calon yang disukai, berdagang, tidak di padang, tidak tahu visi dan misi calon, dan tidak mengetahui calon. Dari penelitian yang telah dilakukan disimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi politik pada pilkada kota padang yaitu faktor kesadaran politik, faktor kepercayaan politik dan faktor latar belakang sosial dan ekonomi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mardatillah, penelitiannya mengkaji tentang *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Golput (Studi Masyarakat Kecamatan Medan Amplas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009)*.<sup>7</sup> Mardatillah sebagai peneliti mencoba untuk mengetahui dan menganalisis tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Golput (Studi Masyarakat Medan Amplas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009). Dia sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena dalam pelaksanaan pemilu masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada saat pemilihan khususnya

---

<sup>7</sup>[http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17268?mode=full&submit\\_simple>Show+full+item+record](http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17268?mode=full&submit_simple>Show+full+item+record)

masyarakat di Kecamatan Medan Amplas. Dengan melihat keadaan seperti itu, maka peneliti yaitu Mardatillah ingin mencoba meneliti faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi munculnya Golput di Kecamatan Medan Amplas dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009. Teori yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan tersebut adalah Teori Partisipasi Politik, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Golput, Partai Politik, Perilaku Golongan Putih dan Sistem Pemilihan Umum. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan sampel 100 orang masyarakat di Kecamatan Medan Amplas.

Faktor latarbelakang sosial-ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan dan pengaruh keluarga sangat memberikan pengaruh kepada masyarakat di Kecamatan Medan Amplas dalam hal tidak ikut memilih (golput) pada saat pemilihan. Faktor psikologis dan pilihan rasional juga turut mempengaruhi mereka untuk tidak ikut serta dalam pemilihan. Dalam hal ini masyarakat masih kurang percaya terhadap calon anggota legislatif ataupun partai politik yang mengusungnya, karena masyarakat menganggap janji-janji calon legislatif maupun partai politik pada saat kampanye tidak terealisasi apabila kekuasaan sudah dimiliki mereka dan kebijakan yang diberikan jauh dari kata memuaskan. Hali inilah yang membuat masyarakat tidak ikut memilih (golput) pada saat pemilihan berlangsung.

**Tabel 2.1**  
**Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Teori dan Konsep	Metode Penelitian	Responden	Lokasi
1	<b>Danny Try Putra</b> <i>(Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2008. )</i>	Partisipasi Politik	Kualitatif Eksploratif, Wawancara	Masyarakat Kota Padang	Kota Padang
2	<b>Mardatillah</b> <i>( Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Golput (Studi Masyarakat Kecamatan Medan Amplas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009). )</i>	Partisipasi Politik	Kualitatif Deskriptif, Wawancara	Masyarakat Kecamatan Medan Amplas	Kecamatan Medan Amplas ( Sumatera Utara )
3	<b>Agung Gunandra</b> <i>(Faktor-faktor Penyebab Non-voter Masyarakat di Kelurahan Belakang Tangsi Pada Pemilu Gubernur tahun 2010 )</i>	Partisipasi Politik dan Faktor Penyebab Non-voter	Kuantitatif Deskriptif, Survei	Masyarakat Kota Padang	Kota Padang

Dari penelitian terdahulu seperti yang dicantumkan di atas maka perbedaan dengan peneliti antara lain dapat dilihat pada proses pengambilan sampel dan metodologi yang dipakai. Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Berbeda dengan penelitian terdahulu memakai metode kualitatif. Peneliti menggunakan kuantitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan lebih terfokus dan memperjelas mengapa masyarakat menjadi golput dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak suaranya.

## 2.2 Teori dan Kepustakaan Konseptual

### 2.2.1 Partisipasi Politik

#### a. Definisi

Pengkajian tentang partisipasi politik telah dilakukan semenjak tahun 1950-an, namun perkembangan yang pesat baru terjadi pada dasawarsa 1960-an. Salah satu tulisan yang membahas partisipasi politik secara mendalam adalah Robert E. Lane yang diterbitkan pada tahun 1959 dengan judul *Political Life, Why People Get Involved in Politics*.<sup>8</sup>

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*countacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.<sup>9</sup>

Herbert McClosky bagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bahagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

---

<sup>8</sup> Jurnal Ilmu Politik no 9.1991. Maswardi Rauf, *Ciri-Ciri Teori Pembangunan Politik : kasus partisipasi politik*, Jakarta : PT. Gramedia bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. hal 2.

Jadi partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dalam kehidupan politik yang mempengaruhi kebijakan umum, seperti ikut serta dalam proses pemberian suara dalam pemilihan umum. Sedangkan asumsi yang mendasari masyarakat harus mempunyai partisipasi politik adalah karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang apa yang paling baik untuk dirinya, karena pada akhirnya keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat tersebut.

Tingginya tingkat partisipasi politik menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah-masalah kenegaraan.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi<sup>10</sup>. Di negara demokratis pemikiran yang mendasari pentingnya konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan bersama serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

---

<sup>10</sup> Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Widraswara Indonesia. hal 140

Beberapa ahli menghubungkan partisipasi politik dengan semakin membaik atau memburuknya sistem demokrasi<sup>11</sup> :

1. Morris Jones berpendapat bahwa semakin sedikit partisipasi politik maka semakin baik demokrasi, sikap apatis dianggap sebagai tanda demokrasi yang sehat, hal ini mengindikasikan adanya toleransi dan kepercayaan pada pemimpin-pemimpin yang dipilih
2. Morris Rosenberg berpendapat bahwa semakin sedikit partisipasi politik berarti semakin buruk keadaan demokrasi, sikap apatis dianggap sebagai tanda timbulnya rasa kurang percaya terhadap efektifitas partisipasi politik yang diberikan.

Walaupun ada perbedaan pandangan dari para ahli tersebut, tetapi pada akhirnya mereka mempunyai pendapat yang sama bahwa yang paling penting adalah “meneliti sebab-sebab mengapa seseorang tidak memberikan suara atau tidak berpartisipasi dalam pemilu”.

Gabriel A. Almond seperti yang dikutip oleh Moehtar Mas'oe'd.<sup>12</sup> mengelompokkan partisipasi politik kedalam dua bentuk, *pertama*, partisipasi konvensional yaitu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern seperti, pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan kontak individual dengan pejabat politik. *Kedua*, partisipasi non-konvensional seperti, mengajukan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan terhadap benda

---

<sup>11</sup> Prof.Dr.A.Hoogerwerf, 1985, *Politikologi Pengertian dan Problem-problemmnya*. Jakarta : Penerbit Erlangga, hal 190.

<sup>12</sup> Moehtar Mas'oe'd dan Colin MacAndrews, 2000, *Perbandingan Sistem Politik*. Jakarta : Gaja Mada University Press, hal 47.

(perusakan, pengeboman, pembakaran) dan tindakan kekerasan terhadap manusia (penculikan, pembunuhan).

#### **b. Bentuk atau Tingkat Partisipasi Politik**

- **Apathy (apatis)**, bukanlah manifestasi dari kepribadian seseorang yang membangkang pada pemerintah tapi semata-mata menandakan kurangnya ketertarikan dalam masalah politik. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya stimulus politik, atau “individu tersebut mungkin merasa bahwa politik tidaklah menarik. Dia merasa bahwa aktifitas politik hanya memberi sedikit atau tidak sama sekali memberi kepuasan dan sedikit hasil langsung”. Apatis merupakan istilah paling umum diantara ketiga istilah, individu yang apatis bisa saja juga *anomic* dan merasa terasing (*alienated*).
- **Anomie** merujuk pada perasaan tidak puas dan frustrasi atas harapan yang tak terpenuhi. “Seorang individu bisa saja menganggap aktifitas politik tidak berguna. Dia mungkin merasa bahwa ia benar-benar tidak bisa mempengaruhi perkembangan peristiwa apapun dan kekuatan politik dia anggap diluar control nya”. Perasaan tak berdaya ini, yang jika menjadi ekstrim dan berlanjut pada ketidakberdayaan dalam mengontrol hidup merupakan *anomie*.
- **Alienation (perasaan terasing)** melebihi *apathy* dan *anomie*. Ini merupakan perasaan merasa benar-benar terasing dari pemerintahan, sebuah kepercayaan bahwa pemerintah hanya

mempunyai sedikit sekali atau bahkan tidak ada efek pada kehidupan pribadi seseorang. Lebih parah lagi, pemerintah mungkin dianggap mempunyai efek jahat atau dijalankan “oleh orang lain untuk orang lain berdasarkan serangkaian peraturan asing”. Karena itu, individu yang merasa terasing, daripada menarik diri dari politik, mengambil jalan alternatif dari aksi politik seperti berusaha mengulingkan pemerintahan dengan jalan kekerasan, atau merubahnya dengan cara lunak, atau beremigrasi. Ketika seluruh kelas, kelompok etnis, atau kelompok ideologi mempunyai perasaan seperti ini, kekuasaan pemerintah perlahan-lahan melemah dan kemungkinan terjadinya revolusi menjadi tinggi.<sup>13</sup>

## **2.2.2 Perilaku Tidak memilih ( *non-voter* )**

### **a. Definisi**

Di Indonesia orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut dengan istilah golongan putih (golput), istilah golput muncul pada tahun 1970-an yang mengacu pada sikap dan tindakan politik untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu Orde Baru karena dinilai tidak demokratis, yaitu dengan cara tetap datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tetapi menusuk lebih dari satu tanda gambar atau menusuk bagian putih dari kartu suara. Mungkin karena cara menusuk bagian putih inilah akhirnya mereka yang tidak berpartisipasi dalam

---

<sup>13</sup> Arnold K. Sherman, Aliza Kolker. *The Social Bases of Politics*. George Mason University

pemilu disebut sebagai golongan putih (golput). Tetapi akhirnya istilah golput menjadi istilah yang umum yaitu sebagai sebutan untuk orang-orang yang tidak ikut memilih dalam pemilihan umum.

Penjelasan lain untuk golongan putih adalah kurangnya ketertarikan dalam politik dan ketidakpercayaan beberapa orang bahwa mereka tak berdaya untuk mempengaruhi keputusan politik. Orientasi semacam ini bukannya menggambarkan penyimpangan kepribadian yang kuat melainkan adaptasi sehat terhadap realitas distribusi kekuatan yang tidak merata dalam masyarakat. Dengan kata lain, penyebab abstain bukanlah masalah kejiwaan tetapi masalah struktur sosial yang persepsi ketidakberdayaan dan ketidakpuasaan berkolerasi dengan status sosio ekonomi yang rendah dan khususnya dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Ahli politik Lester Milbrath<sup>14</sup> telah mengembangkan sebuah model spektrum partisipasi politik terlembaga. Model partisipasi berbentuk piramida tersebut menekankan perbedaan aktifitas politik. Aktifitas berbeda dari segi sumber yang dibutuhkan setiap individu (waktu, uang dan tenaga), jumlah orang yang berpartisipasi dan pengaruh yang mereka punya terhadap proses pengambilan keputusan politik.

Hirarki tersebut tampaknya mempunyai semacam logika intenal, kemajuan alami untuk terlibat dalam politik aktif. Walaupun orang-orang yang melakukan aktivitas yang paling atas juga berkemungkinan melakukan aktifitas pada level yang lebih rendah, pengamatan tidak bisa dipertahankan. Ketika (orang-orang)

---

<sup>14</sup> Arnold K. Sherman, Aliza Kolker. *The Social Bases of Politics*. George Mason University

terlibat lebih jauh dalam politik, (mereka) ikut serta dalam aksi politik yang lebih luas dan (bergerak) maju dalam hirarki dari perilaku yang lebih umum ke yang lebih sedikit.

Golongan putih, yang terdiri dari hampir dari setengah populasi, tidak bisa ditiadakan sebagai kategori sisa yang tidak menarik tapi harus dianalisa secara terpisah. Fenomena golongan putih telah menjadi perdebatan hangat diantara orang-orang yang peduli dengan kekuatan dan kelemahan demokrasi. Dengan merangkum beberapa studi, Lipset menemukan bahwa, "golongan putih dan orang-orang yang tidak tertarik pada masalah politik lebih sulit menerima pendapat orang lain dan punya ketakutan berlebihan terhadap orang asing dibanding orang-orang yang ikut pemilihan dan punya ketertarikan pada masalah politik. "Orang-orang yang paling parah" mengalami "penyakit kronis tidak tahu apa-apa" adalah orang-orang yang tidak terdidik dan kelas sosio ekonominya rendah. karena golongan putih banyak yang berasal dari rakyat miskin dan tidak terdidik dan karena "rendahnya tingkat perekonomian menyebabkan rendahnya tingkat psikologis,". Lipset menyimpulkan bahwa "perbedaan golongan putih dengan para pemilih adalah mereka mempunyai sikap tak acuh pada pemerintahan, ide sinis mengenai demokrasi dan partai politik, sulit menerima perbedaan pendapat tentang standar moral dan sosial dan etnis minoritas dan mereka lebih suka kepemimpinan yang kuat di pemerintah. Singkatnya, demokrasi jauh lebih baik tanpa pemilih seperti mereka.

Besarnya dimensi golongan putih, bagaimanapun, memaksa kita untuk mencari penjelasan yang lebih meyakinkan dari sekedar pola kepribadian yang tak

masuk akal. Pada kenyataannya, sangat gampang untuk menganggap partisipasi (khususnya aktifitas gladiator) sebagai perilaku menyimpang yang memerlukan penjelasan psikologis, karena ikut berpartisipasi dibanding tidak ikut merupakan pola minoritas.

McClousky<sup>15</sup> berpendapat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang yang mempunyai hak pilih tidak ikut dalam pemilihan umum yaitu ;

1. Bersikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai, masalah politik.
2. Karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak akan berhasil.
3. Sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidakikutsertaan merupakan hal yang terpuji.

Konsep golput pada umumnya digunakan untuk merujuk pada fenomena berikut<sup>16</sup>. *Pertama*, orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu atau sistem politik yang ada. *Kedua*, orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, seperti menusuk lebih dari satu tanda gambar. *Ketiga*, orang yang menggunakan hak pilihnya tetapi menusuk bagian putih pada kartu suara. *Keempat*, tidak menggunakan hak suara karena tidak adanya motivasi untuk memilih. Sedangkan dalam penelitian konsep *non-voter* yang dipergunakan adalah warga yang mempunyai hak pilih dalam pilkada tetapi tidak menggunakan hak pilihnya.

<sup>15</sup> *Op.Cit.* Miriam Budiardjo.1998. Hal 5.

<sup>16</sup> Muhammad Asfar, 1998. thesis. *Perilaku Nonvoting Dibawah Sistem Politik Hegemoni*, Universitas Gajah Mada , Yogyakarta.

## **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seseorang untuk Memilih dan Tidak Memilih**

Untuk menjelaskan perilaku *non-voter* dapat dilihat dari empat faktor yaitu; faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik dan dilihat dari segi faktor latarbelakang sosial ekonomi seseorang<sup>17</sup>. Secara terperinci dapat dilihat sebagai berikut :

### 1. Faktor Psikologis

Dari segi faktor psikologis *non-voter* dapat dikelompokkan menjadi dua kategori : *Pertama*, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. *Kedua*, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku *non-voter* disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi. Orang yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tidak acuh cenderung untuk tidak memilih sehingga mereka menarik diri dari percaturan politik langsung, karena merasa tidak berhubungan dengan kepentingannya. Faktor lain yang dapat dilihat untuk menandai ciri kepribadian ini adalah keefektifan personal (*personal effectiveness*), yaitu kemampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk memimpin lingkungan disekitarnya, misalnya seberapa jauh seseorang mampu memimpin teman-teman sepermainannya.

Kelompok kedua lebih menitikberatkan pada faktor orientasi kepribadian pemilih yang secara umum menunjukkan karakteristik apatis, sinisme, anomi

---

<sup>17</sup> Muhammad Asfar, loc.cit

(terpisah) dan alienasi (terasing)<sup>18</sup>. Perasaan apatis, secara sederhana ditandai dengan tidak adanya minat terhadap persoalan politik. Hal ini dapat disebabkan oleh karena rendahnya sosialisasi atau ransangan (stimulus) politik atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktifitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Ada tiga alasan yang melatarbelakangi seseorang bersifat apati yaitu : *pertama*, seseorang merasa bahwa aktifitas politik merupakan ancaman terhadap kehidupan sosialnya, seperti jika ia aktif dalam suatu partai politik tertentu maka ia akan dikucilkan oleh teman atau tetangga dilingkungan ia tinggal. *Kedua*, adanya anggapan bahwa aktifitas politik adalah sia-sia saja, sebagai individu tunggal ia tidak akan mampu mempengaruhi keadaan politik. *Ketiga*, tidak adanya rangsangan dari luar diri individu untuk melakukan kegiatan politik sehingga membuat ia semakin berfikir bahwa kegiatan politik merupakan kegiatan yang sia-sia, hal ini juga dapat disebabkan oleh karena tidak adanya atau kurangnya sosialisasi politik dari pemerintah.

Sinisme, merupakan perasaan kecurigaan terhadap orang lain, hal ini dapat disebabkan oleh karena masyarakat itu bersifat ego-sentris (memusatkan segala sesuatu pada dirinya sendiri wujud dari perasaan itu seperti, tidak adanya rasa percaya terhadap para politisi, anggapan pada kegiatan politik merupakan kegiatan yang kotor, orang yang memegang kekuasaan adalah orang-orang yang tidak punya muka dan individu hanyalah menjadi bulan-bulanan dari kelompok yang memanipulasi.

---

<sup>18</sup> Michael Rush dan Phillip Althoff. 1997. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Grafindo Persada. hal 1997.

Perasaan anomie (terpisah), menunjukkan pada perasaan tidak berguna, perasaan kehilangan nilai dan ketiadaan arah, mereka melihat bahwa aktivitas politik sebagai suatu yang sia-sia, karena setiap aspirasi yang disalurkan tidak pernah ditanggapi pemerintah sehingga mereka merasa kecewa terhadap pemerintah, mereka merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa atau kebijakan politik.

Perasaan alienasi (keterasingan), berada diluar apatis dan anomie, seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Alienasi merupakan perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintah. Kelompok ini menganggap pemerintah tidak mempunyai pengaruh, terutama pengaruh baik, terhadap kehidupan seseorang. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan membentuk aksi politik seperti timbulnya kerusuhan, kekacauan, demonstrasi dan sebagainya.

## 2. Faktor Sistem Politik

Secara teoritis belum ada kesepakatan yang pasti adanya hubungan antara sistem politik dengan ketidakhadiran pemilih atau hubungan antara tingkat kehadiran atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilu. Yang termasuk kedalam sistem politik adalah semua tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat.

Pengamat politik menjadikan pemilu sebagai tolok ukur untuk melihat tingkat demokrasi dalam suatu negara. Tetapi pada kenyataannya kehadiran dan ketidakhadiran dalam pemilu tidak secara jelas menunjukkan adanya hubungan kedua variabel tersebut. Seperti di Amerika Serikat sebagai negara yang disebut

kampium demokrasi, jumlah kehadiran pemilih dalam pemilu tergolong rendah rata-rata hanya 50% saja. Sebaliknya dinegara-negara Eropa Barat tingkat kehadiran pemilih mencapai 90%. Dari segi faktor sistem politik dalam penelitian ini melihat hubungan antara alasan pemilih untuk golput dihubungkan dengan system politik yang sedang berjalan.

### 3. Faktor Kepercayaan Politik

Dalam literatur Ilmu Politik para ahli banyak menggunakan konsep kepercayaan politik untuk menjelaskan keaktifan atau ketidakaktifan (*inactivity*) seseorang dalam dunia politik. Namun didalam menjelaskannya selalu mengandung makna ganda, *Pertama*, ketidakaktifan diinterpretasikan sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau ekspresi atas perasaan keteresaingan (alienasi). *Kedua*, ketidakaktifan dapat juga diinterpretasikan sebagai ekspresi kepercayaan yang tinggi. Misalnya, terbukti bahwa partisipasi dalam sistem politik meningkat pada saat terjadi krisis. Dengan demikian ketidakaktifan seseorang menandakan bahwa mereka puas terhadap sistem politik yang ada atau paling tidak khawatir terhadap sistem politik yang ada. Dan, mereka baru akan akan aktif atau benar-benar berpartisipasi apabila benar-benar kecewa terhadap sistem politik atau keadaan yang ada. Dalam kondisi demikian, ketidakaktifan merupakan suatu pertanda keyakinan atau kepercayaan terhadap sistem politik yang ada.

Penelitian A.Gamson menjelaskan bahwa dalam perilaku *non-voter*, kepercayaan pada sistem politik yang ada dapat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih. Salah satu alasan pemilih tidak hadir dalam pemilu karena

meraka cukup puas dengan keadaan yang ada. Ketidakhadiran dalam pemilu merupakan pertanda kepercayaan pada sistem politik yang ada.

#### 4. Latar Belakang Status Sosial-Ekonomi

Ada 3 (tiga) indikator yang dijadikan untuk mengukur variabel status sosial ekonomi yaitu, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat pekerjaan. Seperti status sosial ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih.

Dikutip dari Muhammad Asraf (1998), menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih. *Pertama*, tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan. *Kedua*, pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiunan misalnya, menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding yang lain. Sebab para pegawai negeri ini sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah seperti kenaikan gaji, pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. *Ketiga*, pendapatan yang tinggi memudahkan orang untuk menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu.

Data penelitian menunjukkan bahwa hubungan bahwa hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat ketidakhadiran selalu menunjukkan arah yang berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang berlatar belakang pendidikan tinggi cenderung angka ketidakhadiran dalam pemilu rendah.

Hubungan antara tingkat pendapat dengan tingkat ketidakhadiran juga menunjukkan pola yang sama. Para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang berlatar belakang pendapatan tinggi cenderung angka ketidakhadiran dalam pemilu rendah. Tetapi beberapa kasus menunjukkan bahwa, para pemilih yang mempunyai “status menyilang” justru cenderung tidak memilih. Misalnya, seseorang pemilih yang tingkat pendidikannya tinggi sementara tingkat pendapatannya rendah.

Penelitian ini memakai teori perilaku memilih, di Indonesia orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut dengan istilah golongan putih (golput), istilah golput muncul pada tahun 1970-an yang mengacu pada sikap dan tindakan politik untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu Orde Baru karena dinilai tidak demokratis, yaitu dengan cara tetap datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tetapi menusuk lebih dari satu tanda gambar atau menusuk bahagian putih dari kartu suara. Mungkin karena cara menusuk bahagian putih inilah akhirnya mereka yang tidak berpartisipasi dalam pemilu disebut sebagai golongan putih (golput). Tetapi akhirnya istilah golput menjadi istilah

yang umum yaitu sebagai sebutan untuk orang-orang yang tidak ikut memilih dalam pemilihan umum

Penjelasan lain untuk golongan putih adalah kurangnya ketertarikan dalam politik dan ketidakpercayaan beberapa orang bahwa mereka tak berdaya untuk mempengaruhi keputusan politik. Orientasi semacam ini bukannya menggambarkan penyimpangan kepribadian yang kuat melainkan adaptasi sehat terhadap realitas distribusi kekuatan yang tidak merata dalam masyarakat. Dengan kata lain, penyebab abstain bukanlah masalah kejiwaan tetapi masalah struktur sosial yang persepsi ketidakberdayaan dan ketidakpuasan berkorelasi dengan status sosio ekonomi yang rendah dan khususnya dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Besarnya dimensi golongan putih, bagaimanapun, memaksa kita untuk mencari penjelasan yang lebih meyakinkan dari sekedar pola kepribadian yang tak masuk akal. Pada kenyataannya, sangat gampang untuk menganggap partisipasi (khususnya aktifitas gladiator) sebagai perilaku menyimpang yang memerlukan penjelasan psikologis, karena ikut berpartisipasi dibanding tidak ikut merupakan pola minoritas.

McClousky<sup>19</sup> berpendapat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang yang mempunyai hak pilih tidak ikut dalam pemilihan umum yaitu ;

1. Bersikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai, masalah politik.

---

<sup>19</sup> *Op.Cit.* Miriam Budiardjo.1998. Hal 5.

- 2 Karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak akan berhasil.
- 3 Sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidakikutsertaan merupakan hal yang terpuji.

Konsep golput pada umumnya digunakan untuk merujuk pada fenomena berikut<sup>20</sup>. *Pertama*, orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu atau sistem politik yang ada. *Kedua*, orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, seperti menusuk lebih dari satu tanda gambar. *Ketiga*, orang yang menggunakan hak pilihnya tetapi menusuk bahagian putih pada kartu suara. *Keempat*, tidak menggunakan hak suara karena tidak adanya motivasi untuk memilih. Sedangkan dalam penelitian konsep *non-voter* yang dipergunakan adalah warga yang mempunyai hak pilih dalam pilkada tetapi tidak menggunakan hak pilihnya.

Untuk menjelaskan perilaku *non-voter* juga dapat dilihat dari empat faktor yaitu; faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik dan dilihat dari segi faktor latarbelakang sosial ekonomi seseorang.

---

<sup>20</sup> Muhammad Asfar, 1998. thesis. *Perilaku Nonvoting Dibawah Sistem Politik Hegemoni*, Universitas Gajah Mada , Yogyakarta.

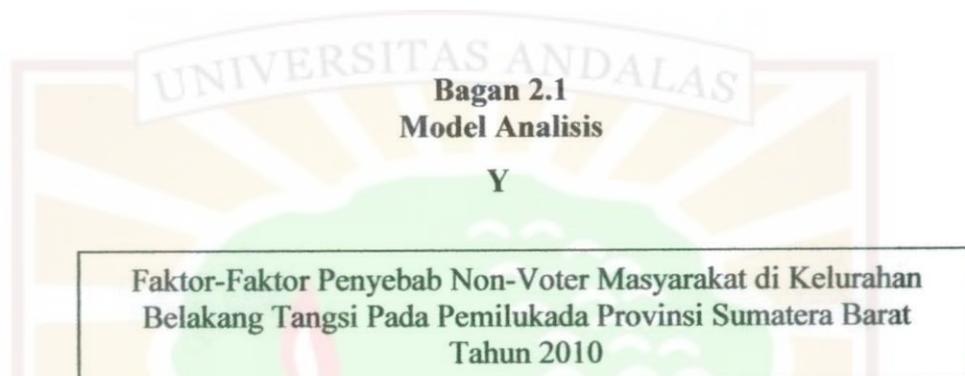
### 2.3 Konstruksi Model Teoritis

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep untuk menjelaskan permasalahan penelitian yang nantinya akan menjadi variabel-variabel yang akan diukur, diantaranya adalah:

1. Partisipasi politik dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dalam kehidupan politik yang mempengaruhi kebijakan umum. Tingginya tingkat partisipasi politik menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah-masalah kenegaraan, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dari partisipasi politik apakah yang menyebabkan faktor-faktor *non-voter* dalam pemilu pada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk memilih dan tidak memilih, disini ada dari faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik dan faktor latar belakang status sosial ekonomi. Dari faktor-faktor yang ada diatas akan dilihat apakah faktor yang paling banyak mempengaruhi masyarakat untuk tidak ikut memilih pada pemilu pada Gubernur tahun 2010.

## 2.4 Model Analisis

Model analisis adalah gambaran sederhana antar variabel.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu variabel (uni variat), berikut ini adalah model analisis penelitian yaitu



## 2.5 Defenisi Operasional Dan Indikator

Operasionalisasi merupakan tahapan terakhir dalam proses pengukuran. Ini merupakan penggambaran prosedur untuk memasukan unit-unit ke dalam kategori-kategori. Defenisi operasional merupakan gambaran teliti mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tertentu dari tiap- tiap variabel<sup>22</sup>. Pada tabel di bawah ini akan disajikan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

<sup>21</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 75.

<sup>22</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 90-91.

**Tabel 2.2**  
**Definisi Operasional dan Indikator**

Konsep	Variabel	Indikator
Partisipasi Politik	Faktor Penyebab Non-Voter	Aktifitas politik merupakan ancaman bagi kehidupan politiknya
		Aktifitas politik adalah sia-sia saja
		Tidak adanya rangsangan dari luar diri individu untuk melakukan kegiatan politik
		Anggapan pada kegiatan politik merupakan kegiatan yang kotor
		Merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa atau kebijakan politik
		Perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan
		Kepercayaan pada sistem politik dapat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih
		Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih
		Tingkat pendapatan dapat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih
Tingkat pekerjaan dapat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih		

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan tipe *descriptif*. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif maka akan diperoleh data-data yang empirik yang memungkinkan peneliti untuk melihat faktor-faktor penyebab *non-voter* di kota Padang pada pemilu pada Gubernur tahun 2010, yang diukur melalui analisa temuan angka dan data. Untuk itulah diperlukan juga penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu misalnya faktor penyebab *non-voter*, peneliti pengembangan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.<sup>23</sup>

Dari pernyataan ini dapat kita lihat bahwa dalam penelitian ini Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melihat kecenderungan umum yang melatarbelakangi faktor-faktor penyebab *non-voter* dalam pemilu pada melalui penganalisaan data-data dan angka<sup>24</sup>. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survei, yaitu penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok<sup>25</sup>. Kuisisioner merupakan lembaran yang berisi beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku. Kuisisioner berguna untuk mendeskripsikan pertanyaan penelitian yang mencakup pengalaman personal, persepsi, opini, sikap dan perilaku orang yang masih hidup.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm 4-5

<sup>24</sup> Masri Singarimbun. *Metode Penelitian survei*. Yogyakarta: 1989. Hlm.5

<sup>25</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*. LP3S. Jakarta. hlm. 3

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Padang Barat. Kota Padang, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi di daerah ini didasarkan pada pertimbangan persentase tertinggi *non-voter* dan *non-voter* tertinggi untuk daerah Kota Padang adalah di Kecamatan Padang Barat yaitu setengah dari hak pilih yang ada di Kecamatan Padang Barat itu sendiri.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.<sup>26</sup>

#### 1. Populasi Sampling / Umum dan Populasi Target

- Populasi Sampling / Umum adalah masyarakat Kecamatan yang memiliki angka *non-voter* yang tertinggi di Kota Padang yaitu Kecamatan Padang Barat yang sudah dewasa atau berumur 17 tahun keatas yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan Gubernur tahun 2010.
- Populasi Sasaran / Target adalah masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Padang Barat yang memiliki angka *non-voter* tertinggi yaitu Kelurahan Belakang Tangsi.

---

<sup>26</sup> Masri Singarimbun, *Op. Cit.*, hal 152.

**Cara-cara pengambilan sampel adalah sebagai berikut :**

Sampel adalah sebagian dari populasi (*a portion of a population*). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik Acak Sederhana (*Simple Random Sampling*), dimana semua individu anggota populasi punya peluang yang sama dan independen untuk dipilih menjadi anggota sampel.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dari Kelurahan yang memiliki angka *non-voter* tertinggi, dipilih TPS mana yang memiliki angka *non-voter* tertinggi dan diurut dari TPS yang memiliki angka *non-voter* tertinggi sampai ke TPS yang memiliki angka *non-voter* terendah.
- 2) Untuk Kelurahan yang memiliki angka *non-voter* tertinggi responden dipilih secara acak di TPS Kelurahan yang memiliki angka *non-voter* tertinggi. Hal ini dilakukan peneliti karena sebaran jumlah populasi terdapat di TPS. Untuk menentukan standar jumlah responden diambil berdasarkan daftar pemilih tetap, setelah populasi ditentukan maka ditentukan jumlah responden minimal. Dalam menentukan responden minimal penelitian ini digunakan rumus Frank Lynck<sup>28</sup>, yaitu:

---

<sup>27</sup> Lisa Harrison. 2007. *Metodologi penelitian Politik*. Jakarta: kencana

<sup>28</sup> Sugiarto dkk, *op. Cit.*, hlm. 60

$$n = \frac{NZ^2 \cdot P(1 - P)}{Nd^2 + Z^2(1 - P)}$$

$$Nd^2 + Z^2(1 - P)$$

dimana: n = Jumlah Sampel

N = Populasi

Z = nilai variabel normal (1,96) untuk tingkat kepercayaan 95%

P = harga patokan tertinggi (0,50)

d = Sampling Error (0,10)

Berdasarkan rumus diatas maka jumlah daftar pemilih pada Kelurahan

Belakang Tangsi adalah :

Data:

$$N = 1.539$$

$$Z = 1.96$$

$$P = 0.50$$

$$d = 0.10$$

$$n = \frac{1.539(1,96)^2 \cdot 0,50(1 - 0,50)}{1.539(0,10)^2 + (1,96)^2 \cdot (1 - 0,50)}$$

$$n = \frac{1539 \cdot 3,8416 \cdot 0,50 \cdot 0,5}{1539 \cdot 0,1 + 3,8416 \cdot 0,5}$$

$$n = \frac{1478,05}{15,58}$$

$$n = 94,86$$

$$n = 100 \text{ Sampel}$$

Maka untuk menentukan jumlah responden yang akan dipilih pada masing-masing TPS, dilihat berdasarkan jumlah DPT yang ada pada masing-masing TPS dengan cara :

$r$  = Jumlah responden per TPS

$X1$  = Jumlah DPT Per TPS

$$r = \frac{X1}{\text{Jumlah DPT Keseluruhan}} \times 100$$

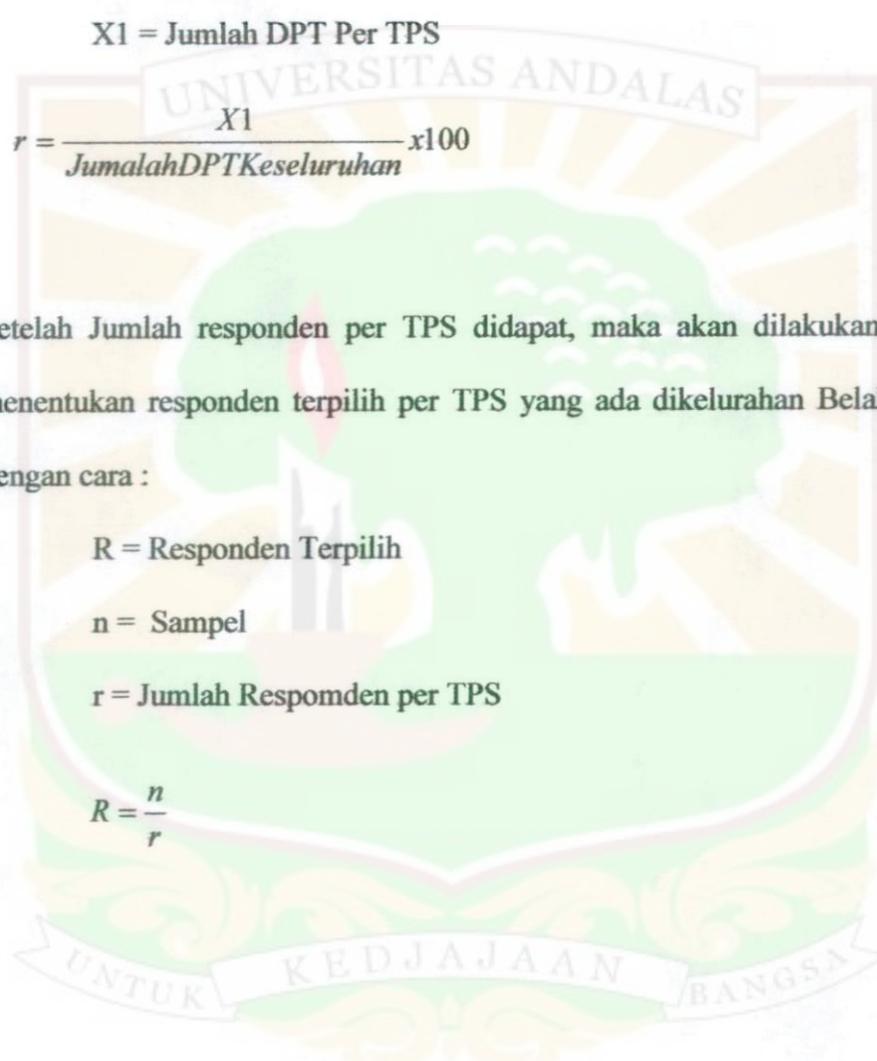
Setelah Jumlah responden per TPS didapat, maka akan dilakukan cara untuk menentukan responden terpilih per TPS yang ada dikelurahan Belakang Tangsi dengan cara :

$R$  = Responden Terpilih

$n$  = Sampel

$r$  = Jumlah Responden per TPS

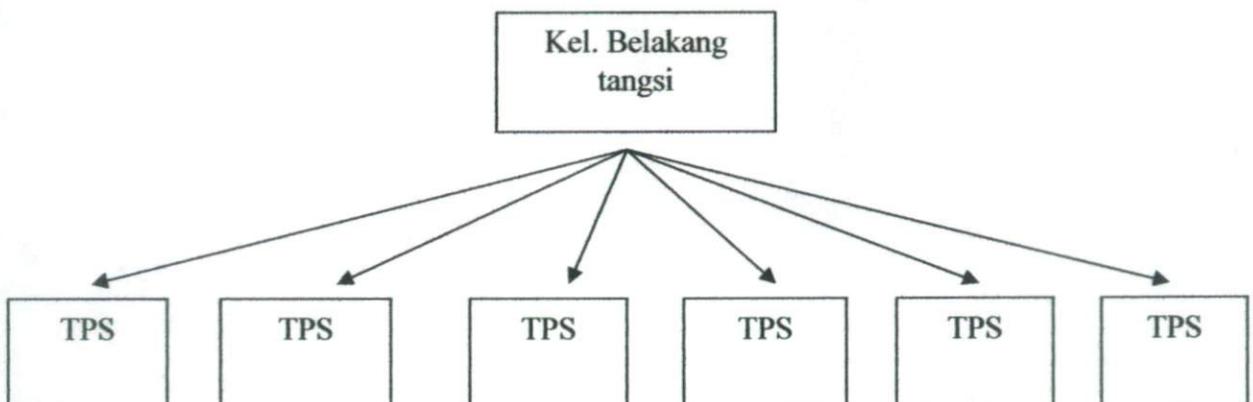
$$R = \frac{n}{r}$$



**Tabel 3.1**  
**Pemilihan Responden**

No	TPS	$r = \text{Jumlah Responden Per TPS}$	$R = \text{Responden Terpilih}$
1	TPS 3	$r = \frac{345}{1.539} \times 100$ = 22	$R = \frac{100}{22}$ = 4,54 = 5
2	TPS 6	$r = \frac{323}{1.539} \times 100$ = 21	$R = \frac{100}{21}$ = 4,76 = 5
3	TPS 4	$r = \frac{290}{1.539} \times 100$ = 19	$R = \frac{100}{19}$ = 5,26 = 5
4	TPS 1	$r = \frac{251}{1.539} \times 100$ = 16	$R = \frac{100}{16}$ = 6,25 = 6
5	TPS 2	$r = \frac{176}{1.539} \times 100$ = 11	$R = \frac{100}{14}$ = 7,14 = 7
6	TPS 5	$r = \frac{154}{1.539} \times 100$ = 10	$R = \frac{100}{10}$ = 10 = 10
Jumlah		100	

**Bagan 3.1**  
**Teknik Pengambilan Sampel**



Dari pengambilan sampel di lapangan yang dilakukan peneliti ketika memilih responden untuk diwawancara, ada sebagian responden yang diambil dengan cara *accidental* untuk melakukan wawancara dan tidak menggunakan data dari data daftar pemilih tetap dan sebagian responden lain diambil sebagai sampel berdasarkan daftar pemilih tetap. Hal ini dilakukan karena daftar masyarakat yang terdaftar di daftar pemilih tetap di Kelurahan Belakang Tangsi sudah banyak yang tidak berdomisili lagi di Kelurahan Belakang Tangsi, disebabkan sebagian besar masyarakatnya sudah berpindah tempat tinggal dan adanya masyarakat yang telah meninggal dunia.

#### **3.4 Unit Analisis**

Unit analisis merupakan satuan yang akan diteliti, yang akan menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, karena yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan *non-voter* di dalam masyarakat pada pemilukada Gubernur tahun 2010.

#### **3.5 Jenis, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah berbentuk data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh langsung dari responden berupa kuisisioner. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, baik itu berupa dokumentasi, data demografi, kondisi geografis, data-data tentang pemilu dan data-data lain yang memberikan informasi kepada peneliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuisisioner, dimana pada

teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka (*face to face interview*), karena dengan cara ini mempunyai tingkat pengembalian yang sangat tinggi.<sup>29</sup> Alat pengumpul data yang digunakan peneliti adalah kuisisioner. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.<sup>30</sup>

### 3.6 Validitas dan Reabilitas

Pengujian validitas dan reabilitas adalah proses menguji butir-butir pertanyaan yang ada dalam sebuah kuesioner. Validitas dalam artian pertanyaan-pertanyaan yang ada dapat mengukur apa yang ingin diukur. Dan reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.<sup>31</sup> Apakah hasil pengukuran tersebut akan relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih.

Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, maka langkah pertama, peneliti mendefinisikan secara konsep yang akan diukur. Kedua, yaitu melakukan uji coba skala pengukuran tersebut pada beberapa orang responden, artinya peneliti memberikan kuesioner kepada sejumlah responden sebagai uji coba terlebih dahulu.

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Sedangkan uji

---

<sup>29</sup> Bambang Prasetyo, *Op.Cit.*, hal 153.

<sup>30</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal 67

<sup>31</sup> Masri Singarimbun, *Op. Cit*, hal 140.

reabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan variabel<sup>32</sup>. Untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam kuisioner yang akan diajukan kepada responden valid dan realibel dengan menggunakan program SPSS, dengan melihat nilai *Corrected Item-Total Correlation* masing-masing pertanyaan pada table *Item-Total Statistics*. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected Item-Total Correlation* > dari r-tabel. Jika nilai *Croanbach's Alpa* > dari 0,60 maka reabilitas pertanyaan tersebut baik<sup>33</sup>.

### 3.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>34</sup>. Jenis analisis data ada dua yakni tabulasi silang dan tabel frekuensi (distribusi frekuensi).

Jika data yang diperoleh adalah data-data empirik, dengan demikian maka proses penganalisaan data menggunakan analisis data kuantitatif atau analisis statistik dalam bentuk analisis tabulasi silang atau teknik elaborasi yakni metode analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel<sup>35</sup>. Metode Tabulasi Silang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel dalam satu tabel. Variabel yang dianalisa dengan metode ini adalah variabel memiliki skala nominal.

---

<sup>32</sup> Nugroho, Bhuono Agung, Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2005. Hlm 67 dan 72.

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 144

<sup>34</sup> Masri Singarimbun, hal 263

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 273

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis tabel frekuensi, dimana tabel frekuensi ini adalah pengorganisasian sebaran nilai-nilai variabel dari sejumlah individu atau objek yang diamati kedalam skala-skala nilai yang telah ditetapkan<sup>36</sup>.

### 3.8 Struktur Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pilkada serta perubahannya menjadi pemilukada dan tata cara pemilukada dilaksanakan. Dengan sistem yang berbeda ini sangat diharapkan dapat mendatangkan suasana baru dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia termasuk di masyarakat Sumatera Barat khususnya. Masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya ke TPS-TPS untuk memilih Kepala Daerah tanpa harus memakai istilah “membeli kucing dalam karung lagi”.

Kota Padang merupakan Ibu Kota provinsi Sumatera Barat yang sering disebut-sebut sebagai barometer politik Sumatera Barat dimana tingkat pendidikan dan kesejahteraan cukup tinggi, arus informasi serta fasilitas pendidikan pun lengkap dan serba dekat. Akan tetapi Kota Padang menjadi salah satu tempat angka golput yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dalam pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### BAB II KERANGKA TEORI DAN PENGUKURAN

Bab ini berisikan beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan bagi peneliti dalam melihat faktor penyebab *non-voter*. Teori yang

---

<sup>36</sup> Riswandha Imawan, *op.cit* , *Tekhnik Analisa Data* hal 3

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi politik dan beberapa konsep lain seperti faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik dan faktor latar belakang status sosial ekonomi yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih dan tidak memilih dalam pemilu. Pada dasarnya peneliti ingin melihat faktor-faktor penyebab *non-voter* di dalam masyarakat.

### BAB III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang dipakai dalam penelitian serta dalam mengolah dan menganalisa data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk pengujian terhadap sebuah teori dan untuk menguatkan data yang diperoleh dari lapangan. Sementara dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan menggunakan kuesioner serta survei lapangan.

### BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menggambarkan lokasi penelitian yang digunakan untuk mendukung penjelasan terhadap masalah yang diteliti, dimana penelitian ini dilaksanakan di kota Padang pada satu Kelurahan yaitu Kelurahan Belakang tangsi Kecamatan Padang Barat.

### BAB V JUDUL ( TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN)

Merupakan pemaparan dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Pada penelitian ini peneliti memaparkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan setelah pengolahan data dilakukan dengan SPSS.

## BAB VI PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan terhadap pemaparan hasil penelitian yang disertai dengan saran peneliti terhadap topik penelitian. Peneliti akan memaparkan kesimpulan dari apa yang peneliti dapatkan dari penelitian ini. Dan apakah nantinya ada juga yang ingin meneliti mengenai topik yang sama semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman nantinya bagi peneliti yang lain.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Deskripsi Umum Kota Padang<sup>1</sup>

Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat terletak di pantai barat pulau Sumatera mempunyai luas wilayah administratif sekitar 1.414,96 km<sup>2</sup> terletak dipesisir pantai Barat Pulau Sumatera pada posisi atmosfer antara 00° 05'05" BT-100°34'09" BT dan 00°44'00" LS-01°08'35" LS. Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1980 dan Perda Nomor 10 Tahun 2005 wilayah kota padang terdiri dari 11 kecamatan dengan 104 kelurahan. Luas wilayah terdiri dari 694,96 km<sup>2</sup> daratan dan 720,00 km<sup>2</sup> perairan/laut yang merupakan hasil perluasan kota Padang tahun 1980, yaitu penambahan luas wilayah dengan 3 kecamatan dan 15 kelurahan.

Perluasan wilayah ini terjadi dengan menggabungkan 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebelumnya memiliki kedekatan sosial budaya dengan Kota Padang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Padang Luar Kota, yaitu Kecamatan Nanggalo Koto Tangah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Oleh karena luas wilayah dan alasan efektivitas pembangunan, ketiga kecamatan tersebut dijadikan 7 kecamatan. Pembentukan wilayah kecamatan baru mempertimbangkan struktur sosial budaya masyarakat dan kesatuan adat nagari agar tidak terpisahkan, maka wilayah administrasi kecamatan disesuaikan dengan kesatuan adat nagari yang sudah ada, sedangkan tambahan satu kecamatan lagi adalah Kecamatan Padang Utara yaitu berasal dari

---

<sup>1</sup> Diolah dari RPJMD KOTA PADANG 2009-2014

wilayah Koto Tangah dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Barat yang lama.

Batas-batas wilayah Kota Padang, adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

## **4.2. Kecamatan dan Kelurahan**

### **1. Kecamatan Padang Barat**

Kecamatan Padang Barat terletak pada  $0,54^{\circ}$ - $1,80^{\circ}$  LS dan  $100^{\circ},34$  BT, memiliki luas wilayah  $7,00$  Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 61.437 jiwa yang terdiri dari 30.589 jiwa perempuan dan 30.848 jiwa laki-laki. Kecamatan ini terdiri dari 10 kelurahan.

Batas wilayah Kecamatan Bungus Teluk Kabung:

- Utara : Kecamatan Padang Utara
- Selatan : Kecamatan Padang Selatan
- Barat : Samudera Indonesia
- Timur : Kecamatan Padang Timur

**Tabel 4.1**  
**Hasil Pemilukada Kota Padang**

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR BERDASARKAN NOMOR URUT				
		1	2	3	4	5
1	PADANG SELATAN	330	7.237	5.380	5.004	3.907
2	PADANG TIMUR	470	9.509	8.428	5.186	4.602
3	PADANG BARAT	254	6.816	3.910	3.812	2.344
4	PADANG UTARA	287	6.740	6.118	2.923	3.203
5	BUNGUS TELUK KABUNG	77	1.298	2.170	1.657	3.851
6	LUBUK BEGALUNG	533	11.801	11.335	7.897	7.960
7	LUBUK KILANGAN	303	4.868	6.573	2.935	3.019
8	PAUH	244	5.266	7.255	2.450	3.351
9	KURANJI	551	11.450	19.547	4.704	7.739
10	NANGGALO	385	7.024	5.396	3.164	4.057
11	KOTO TANGAH	869	14.610	14.218	8.281	20.222
<b>JUMLAH</b>		4.303	86.619	90.330	48.013	64.255

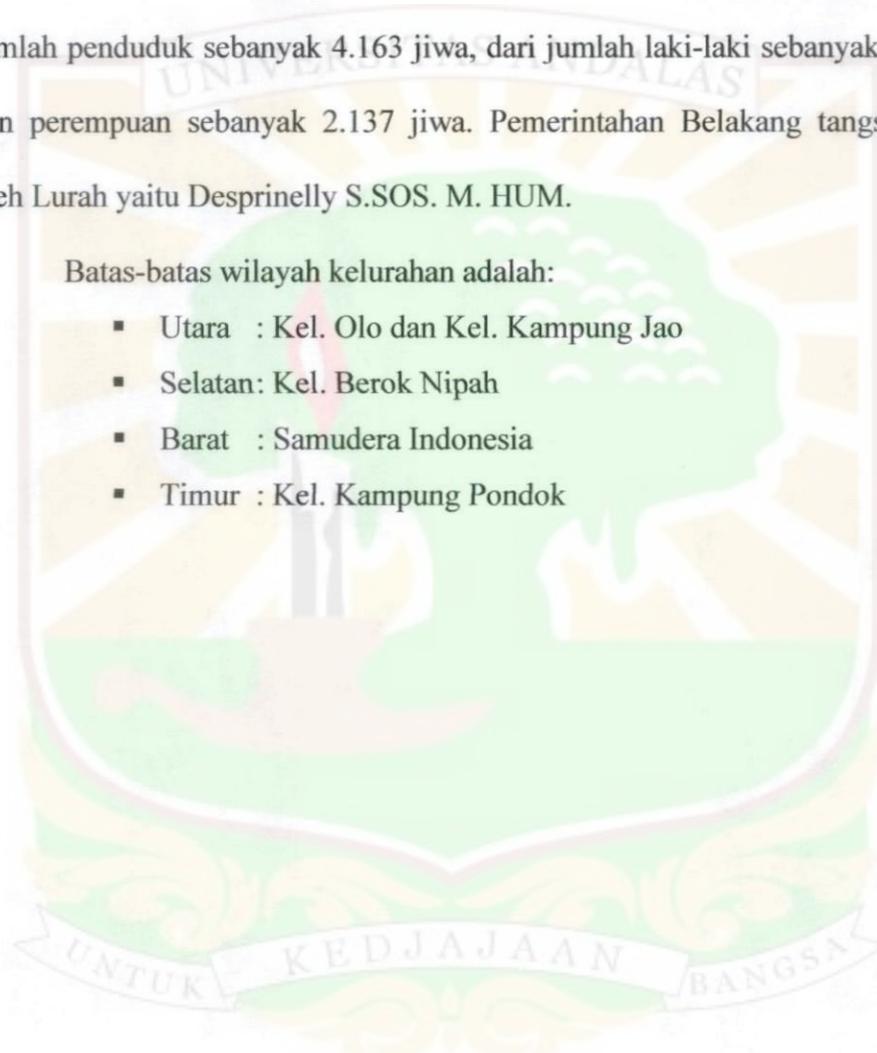


## 2. Kelurahan Belakang Tangsi

Kelurahan ini merupakan kelurahan yang terpilih untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 0,57 Km. Pada kelurahan ini terdapat 6 RW dan 36 RT. Kelurahan Belakang Tangsi memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.163 jiwa, dari jumlah laki-laki sebanyak 2.026 jiwa dan perempuan sebanyak 2.137 jiwa. Pemerintahan Belakang tangsi dipimpin oleh Lurah yaitu Desprinelly S.SOS. M. HUM.

Batas-batas wilayah kelurahan adalah:

- Utara : Kel. Olo dan Kel. Kampung Jao
- Selatan: Kel. Berok Nipah
- Barat : Samudera Indonesia
- Timur : Kel. Kampung Pondok



## BAB V

### TEMUAN DAN DESKRIPSI DATA

#### 5.1. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini responden yang dijadikan objek penelitian adalah masyarakat yang terdapat pada Kelurahan Belakang Tangsi yang sudah berumur 17 tahun keatas atau yang telah menikah yang telah memiliki hak pilih.

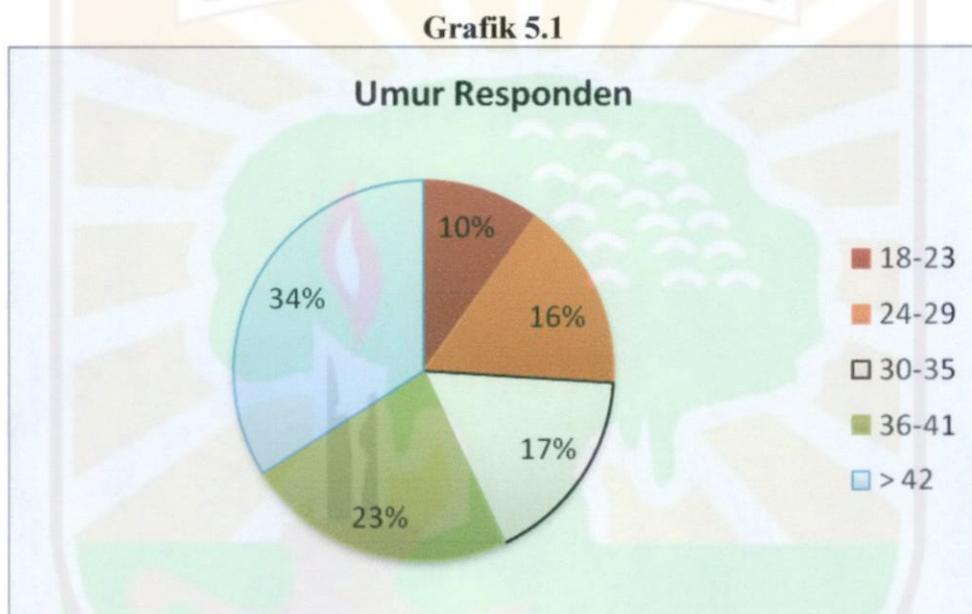
Masyarakat Belakang Tangsi sebagian besar banyak yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, ini disebabkan di dalam DPT tersebut daftar nama-nama masyarakat banyak yang tidak ada lagi atau sudah ada yang meninggal, disini hal tersebut diperkuat lagi oleh Ketua-ketua RT yang ada di Kelurahan Belakang Tangsi yang mengatakan bahwa daftar DPT ini adalah masalah yang terjadi setiap akan diadakan pemilukada ataupun pemilihan umum dan pemilihan legislatif. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa memberikan hak suaranya dalam pemilukada Gubernur tahun 2010, jadi dari data yang diperoleh maka masyarakat Belakang Tangsi yang tidak bisa atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada dijadikan responden dalam penelitian ini.

Dari pengambilan sampel di lapangan yang dilakukan peneliti ketika memilih responden untuk diwawancara, ada sebagian responden yang diambil dengan cara *accidental* untuk melakukan wawancara dan tidak menggunakan data dari data daftar pemilih tetap dan sebagian responden lain diambil sebagai sampel berdasarkan daftar pemilih tetap. Hal ini dilakukan karena daftar masyarakat yang terdaftar di daftar pemilih tetap di Kelurahan Belakang Tangsi sudah banyak yang tidak berdomisili lagi di Kelurahan Belakang Tangsi, disebabkan sebagian besar

masyarakatnya sudah berpindah tempat tinggal dan adanya masyarakat yang telah meninggal dunia.

### 5.1.1. Responden Berdasarkan Umur

Untuk melihat keberagaman usia yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:



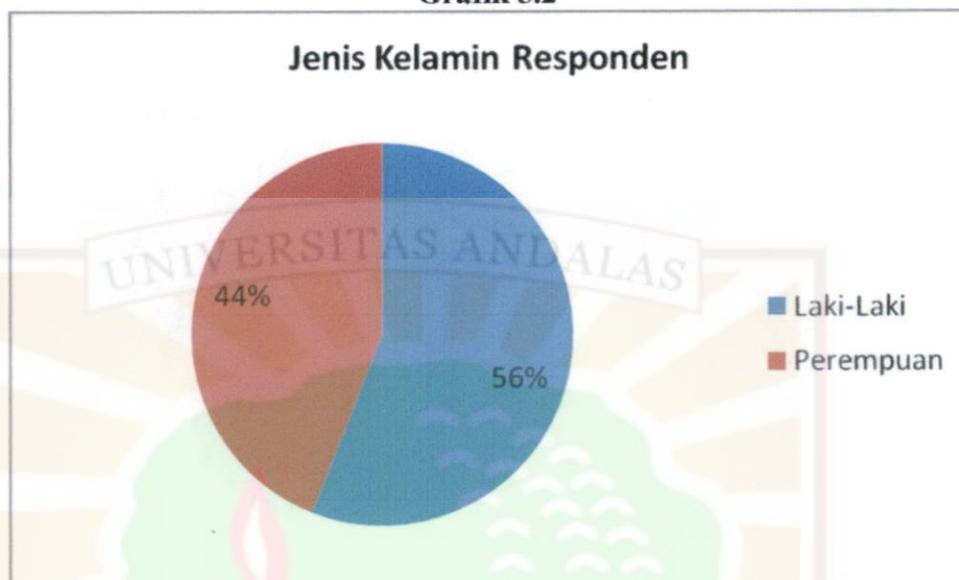
*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

Berdasarkan pada grafik diatas dapat terlihat bahwa dari 100 responden yang paling banyak berusia 42 tahun keatas, selanjutnya yang paling sedikit berumur 18-23 tahun. Dengan data ini terlihat bahwa yang menjadi responden pada penelitian ini sudah mewakili dari semua kalangan usia yang telah memiliki hak pilih.

### 5.1.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melihat responden berdasarkan jenis kelamin yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 5.2**



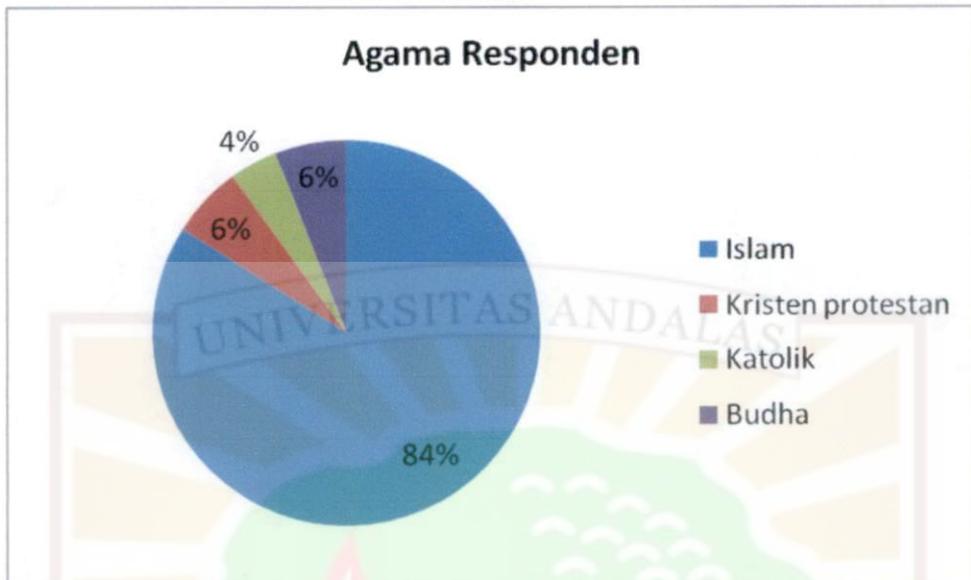
*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

Berdasarkan pada grafik diatas dapat terlihat bahwa dari 100 responden sebanyak 56% responden adalah laki-laki sedangkan yang berjenis kelamin perempuan adalah wanita. Berdasarkan jenis kelamin inilah responden dipilih untuk ditanya dengan menggunakan kuesioner.

### **5.1.3 Responden Berdasarkan Agama**

Untuk melihat responden berdasarkan agama yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 5.3**



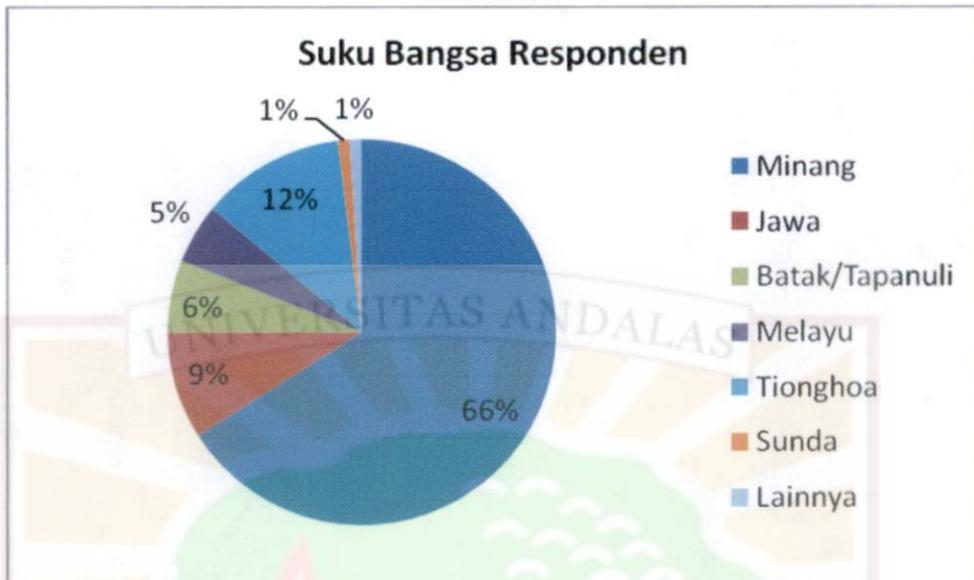
*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

Berdasarkan pada grafik diatas dapat terlihat bahwa dari 100 responden yang menganut agama Islam adalah yang paling banyak yaitu sebanyak 84% dan responden yang menganut agama Katolik adalah yang paling sedikit yaitu sebanyak 4%. Dengan data yang ada terlihat bahwa telah memenuhi untuk dijadikan responden karena telah mewakili agama yang ada.

#### **5.1.4 Responden Berdasarkan Suku Bangsa**

Untuk melihat responden berdasarkan suku bangsa yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 5.4**



*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

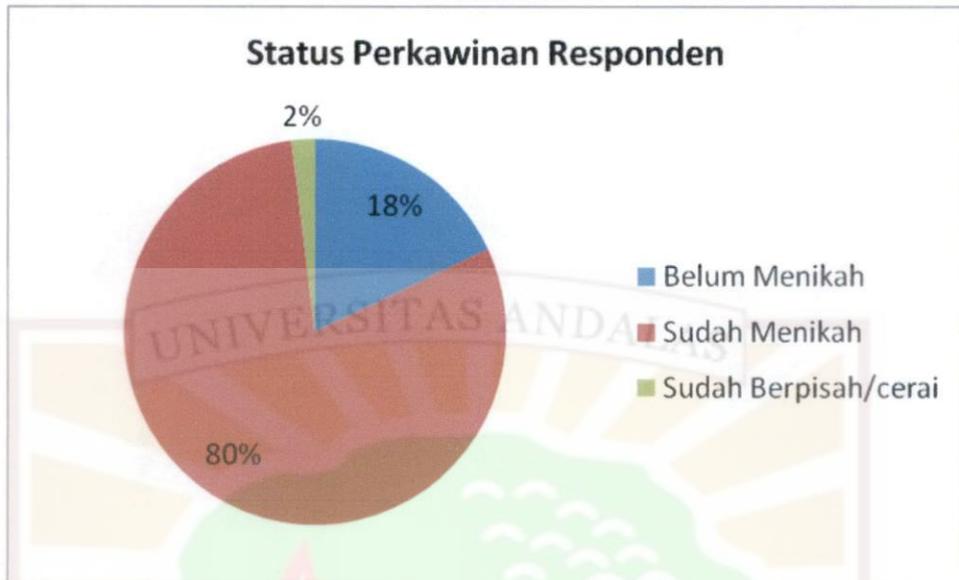
Berdasarkan pada grafik diatas dapat terlihat bahwa dari 100 responden suku bangsa yang paling banyak adalah suku Minang yaitu 66% sedangkan suku bangsa yang paling sedikit yaitu suku Sunda. Dari data yang diperoleh dapat dikatakan pemilihan responden berdasarkan suku bangsa telah dapat dilakukan karena secara besar telah mewakili suku bangsa yang ada.

#### **5.1.5 Responden Berdasarkan Status Perkawinan**

Untuk melihat responden berdasarkan status perkawinan yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:



**Grafik 5.5**



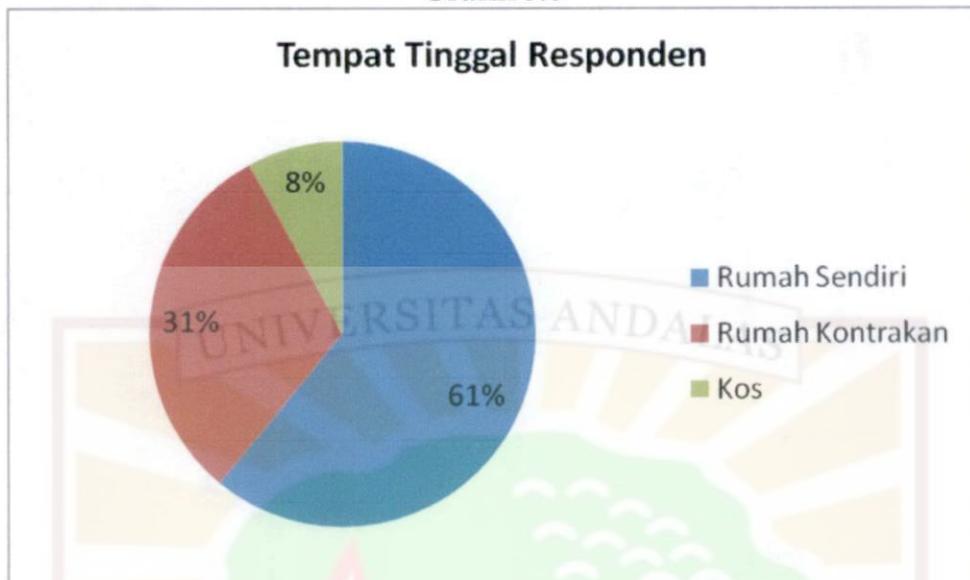
*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

Berdasarkan pada grafik diatas dapat terlihat bahwa dari 100 responden berdasarkan status perkawinannya, responden yang telah menikah merupakan responden yang paling banyak yaitu 80% sedangkan responden yang telah bercerai yang paling sedikit yaitu 2%.

#### **5.1.6 Responden Berdasarkan Tempat Tinggal**

Untuk melihat masyarakat berdasarkan tempat tinggal yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 5.6**



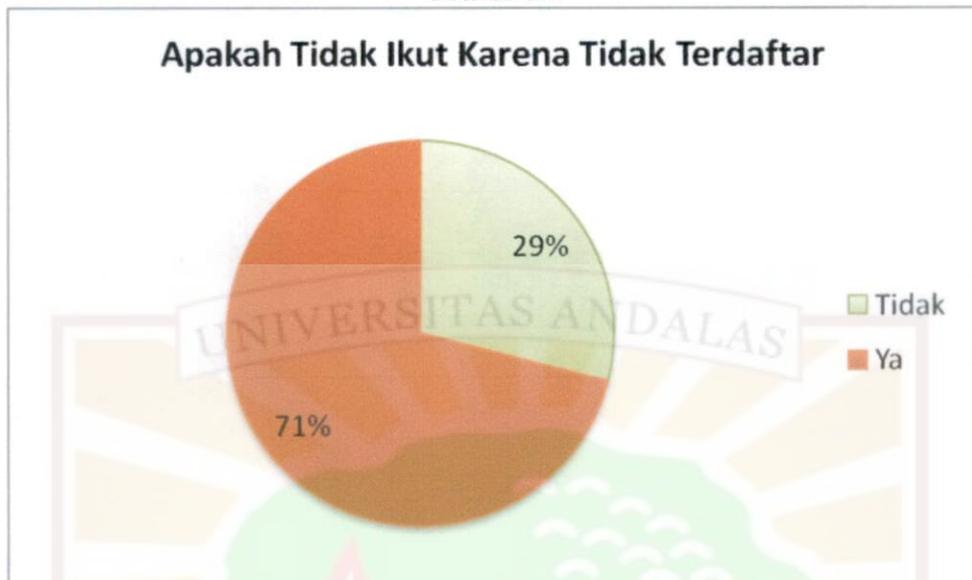
*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 100 responden berdasarkan tempat tinggal, responden yang memiliki rumah sendiri adalah yang paling banyak yaitu 61% sedangkan responden yang tinggal di tempat kos adalah responden yang paling sedikit yaitu 8%.

#### **5.1.7 Responden Berdasarkan DPT (daftar pemilih tetap)**

Untuk melihat masyarakat berdasarkan DPT (daftar pemilih tetap) yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 5.7**



*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 100 responden, masyarakat yang tidak ikut memilih dalam pemilihan Gubernur banyak disebabkan karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sebanyak 71 responden tidak terdaftar dalam DPT dan hanya sebanyak 29 responden yang terdaftar dalam DPT. Di dalam persen yang tidak terdaftar dalam DPT adalah 71% dan yang terdaftar di dalam DPT adalah 29%. Selanjutnya yang terdaftar di DPT juga tidak ikut dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2010 karena berbagai faktor yang akan dijelaskan dalam grafik yang lebih lanjut.

Setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti melakukan analisis data yang difokuskan hanya kepada 29 responden yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2010. Jadi analisis yang dilakukan peneliti terfokus pada 29 responden tersebut yang dapat dilihat pada penjelasan grafik berikut :

### 5.1.8 Responden Berdasarkan Ketidaktahuan Adanya Pemilukada

Untuk melihat masyarakat berdasarkan ketidaktahuan adanya pemilukada yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 5.8**

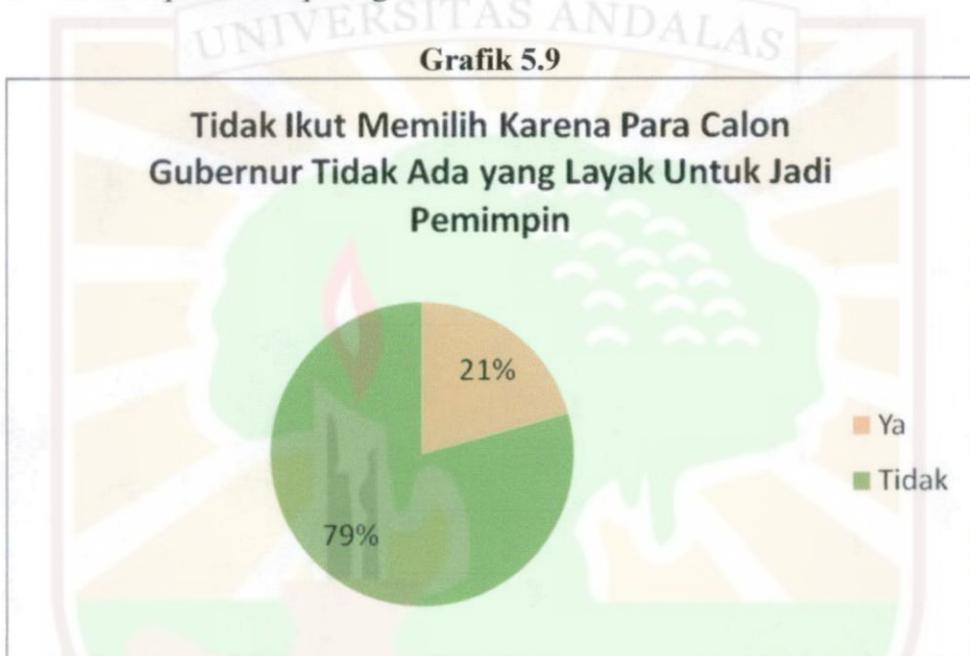


*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 29 responden mereka merupakan individu yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada Gubernur bukan disebabkan ketidaktahuannya akan adanya pemilukada Gubernur Sumatera Barat tahun 2010. Masyarakat umumnya tahu akan adanya pemilukada tetapi tetap tidak menggunakan hak pilihnya karena faktor DPT serta faktor lainnya ketika pemilukada dilaksanakan.

### 5.1.9 Responden Berdasarkan Layaknya Calon Gubernur Menurut Masyarakat

Untuk melihat masyarakat berdasarkan persepsinya tentang layak atau tidaknya calon Gubernur dalam pemilukada yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:



*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 29 responden merupakan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sebagian besar berpendapat bahwa bukan tidak adanya calon Gubernur yang tidak layak dalam pemilukada Gubernur Sumatera Barat tahun 2010, sebanyak 6 responden yang mengatakan bahwa tidak adanya calon Gubernur yang pantas untuk dipilih dan sebanyak 23 responden yang mengatakan calon Gubernur tersebut pantas untuk mencalonkan diri. Di dalam persen responden yang mengatakan tidak ada calon Gubernur yang pantas untuk mencalonkan diri adalah 21 % dan yang mengatakan calon Gubernur tersebut pantas untuk mencalonkan diri adalah 79 %. Meskipun

ada sebagian kecil masyarakat yang mengatakan bahwa calon Gubernur tidak ada yang layak itupun sepertinya tidak akan mempengaruhi masyarakat dalam hal ketidakikutsertaannya dalam pemilukada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.

#### 5.1.10 Responden Berdasarkan Memilih atau Tidak Memilih Tidak Berpengaruh Terhadap Kehidupannya

Untuk melihat masyarakat berdasarkan pengaruh memilih atau tidak memilih terhadap kehidupannya yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:



*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 29 responden sebanyak 20 responden mengatakan pemilukada membawa pengaruh terhadap kehidupannya dan sebanyak 9 responden yang mengatakan bahwa pemilukada tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Di dalam persen responden yang

mengatakan apabila memilih tidak akan berpengaruh kepada kehidupannya adalah 31% dan responden yang mengatakan apabila memilih akan berpengaruh kepada kehidupannya adalah 69%.

#### 5.1.11 Responden Berdasarkan Ketidaksukaan Terhadap Calon Gubernur

Untuk melihat masyarakat berdasarkan ketidaksukaan terhadap calon Gubernur yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 29 responden sebanyak 25 responden yang mengatakan tidak dan sebanyak 4 responden yang mengatakan iya. Di dalam persen responden yang mengatakan tidak suka terhadap calon Gubernur yang mencalonkan diri adalah 14% dan responden yang mengatakan suka terhadap calon Gubernur adalah 86%. Responden yang tidak ikut serta memilih sebagian besar bukan disebabkan tidak adanya calon Gubernur yang

disukai sedangkan yang mengatakan tidak adanya calon Gubernur yang disukai hanya sebagian kecil saja. Disini terlihat bahwa masyarakat Belakang Tangsi pada umumnya bukanlah masyarakat yang tidak percaya terhadap politisi.

#### 5.1.12 Responden Berdasarkan Ketidakinginan Untuk Memilih

Untuk melihat masyarakat berdasarkan ketidakinginan untuk memilih yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:



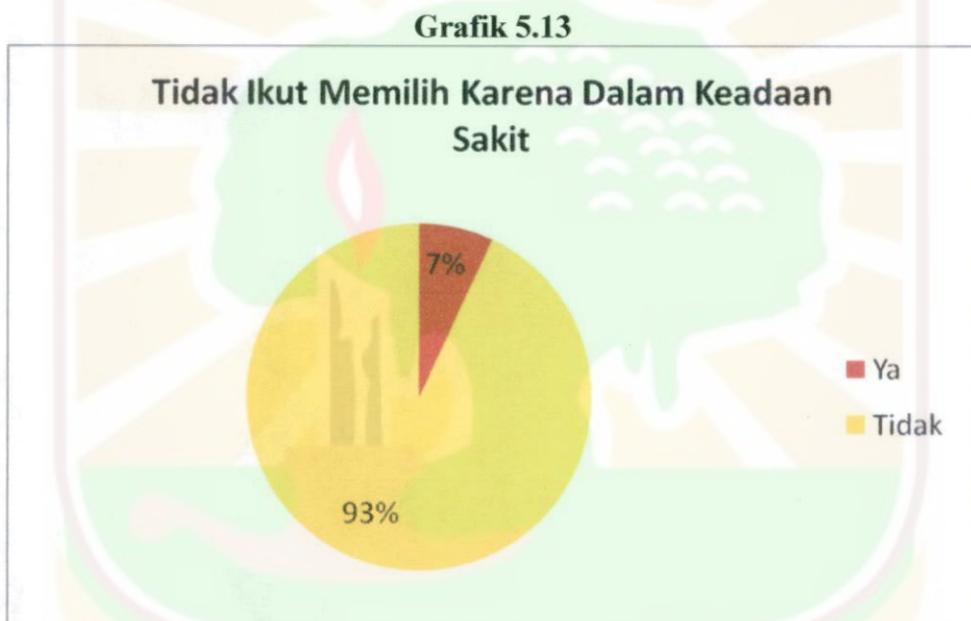
*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 29 responden sebanyak 20 responden mengatakan tidak dan sebanyak 9 responden yang mengatakan iya. Di dalam persen responden yang memang tidak ingin memilih adalah 31% dan mengatakan ingin memilih tetapi tidak bisa memilih adalah 69%. Masyarakat yang tidak ingin memilih dalam pilukada Gubernur hanyalah sebagian kecil dari masyarakat yang ingin memilih dalam pilukada Gubernur Sumatera Barat

Tahun 2010. Masyarakat sebenarnya apabila masuk dalam DPT sebagian besar akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada Gubernur.

### 5.1.13 Responden Berdasarkan Pada Pemilukada Sedang Sakit

Untuk melihat masyarakat berdasarkan pada saat pemilukada sedang sakit yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:



*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 29 responden sebanyak 27 responden mengatakan tidak dan sebanyak 2 responden yang mengatakan tidak. Di dalam persen responden yang sedang sakit ketika pemilukada adalah 7% dan responden yang tidak dalam keadaan sakit adalah 93%. Masyarakat yaitu responden yang sakit ketika pemilukada dilaksanakan hanya sebagian kecil dan itu bukanlah salah satu penyebab terbesar yang menyebabkan masyarakat tidak

menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.

#### 5.1.14 Responden Berdasarkan Adanya Pekerjaan Lebih Penting

Untuk melihat masyarakat berdasarkan adanya pekerjaan lebih penting yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:

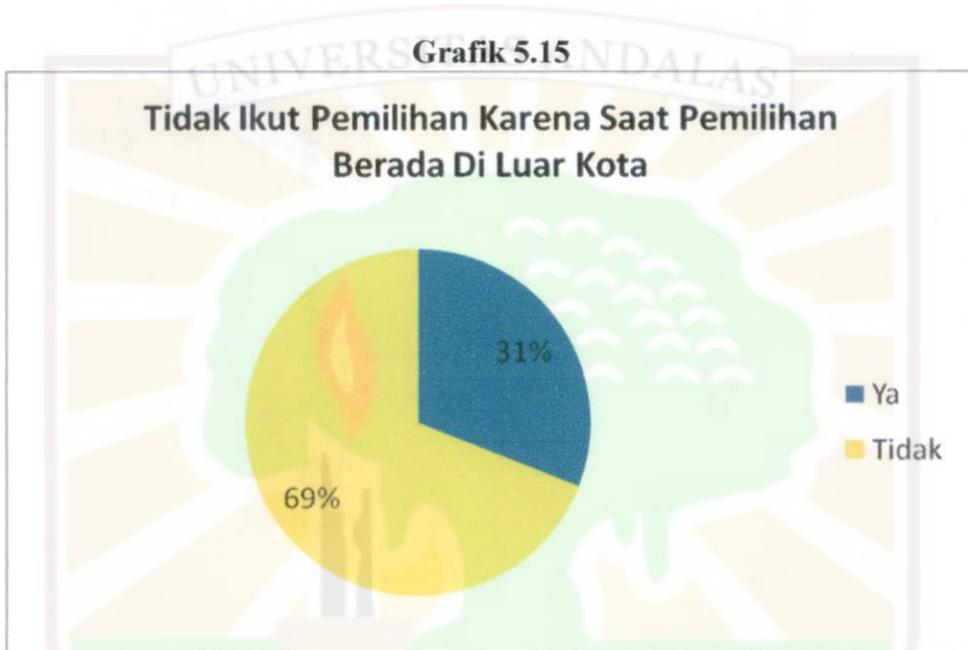


*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 29 responden sebanyak 16 responden mengatakan tidak dan sebanyak 13 responden yang mengatakan iya. Di dalam persen responden yang mengatakan adanya pekerjaan lain yang lebih penting daripada ketika pemilukada adalah 45% dan responden yang tidak memiliki pekerjaan penting ketika pemilukada dilaksanakan adalah 55%. Pada *point* inilah terlihat faktor terbesar yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 di Kelurahan Belakang tangsi.

### 5.1.15 Responden Berdasarkan Sedang Berada di Luar Kota

Untuk melihat masyarakat berdasarkan pada pemelukada sedang di luar Kota yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:



*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 29 responden sebanyak 20 responden mengatakan tidak dan sebanyak 9 responden yang mengatakan tidak. Masyarakat yang sedang keluar kota disaat hari pemelukada bukanlah jumlah yang besar yang bisa mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemelukada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.

## BAB VI

### ANALISIS DAN INTREPERTASI DATA

#### 6.1 Hubungan Faktor–Faktor Penyebab *Non–Voter* Masyarakat Pada Pemilukada Gubernur Tahun 2010.

Terkait dengan fokus pada penelitian ini yang pada tujuannya adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab *non-voter* di dalam masyarakat pada pemilukada Gubernur tahun 2010. Dari data ini peneliti ingin melihat apakah faktor paling utama yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilukada Gubernur yang diselenggarakan pada tahun 2010 kemarin. Berdasarkan pada data yang telah diperoleh pada umumnya responden pada penelitian ini telah mengetahui mengenai akan adanya pemilukada yang akan dilaksanakan untuk memilih Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2010 yang lewat, terbukti dengan data yang diperoleh dari hasil kuesoner yang disebarkan sebagaimana yang telah dipaparkan pada BAB V yaitu dapat dilihat pada Grafik berikut:

**Tabel 6.1**  
**Faktor Utama Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilu Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010**

Faktor Penyebab <i>Non Voter</i>	Frekuensi	
	ya	tidak
Adanya Pekerjaan Yang Lebih Penting	45%	55%
Tahu Tentang Informasi Pemilu	100%	0%
Kelayakan Calon	21%	79%
Pengaruh Pemilu	31%	69%
Tidak Ikut Memilih Karena Tidak ada Calon Yang Disukai	14%	86%
Calon Tidak Memilih Karena memang tidak Ingin Memilih	31%	69%
Sedang Diluar Kota	31%	69%

*Sumber: Data Primer Tahun 2011*

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat Belang Tangsi tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu Gubernur tahun 2010 adalah cukup banyaknya masyarakat memiliki pekerjaan yang lebih penting, sebanyak 55% responden tidak memiliki pekerjaan yang mereka anggap lebih penting sedangkan sebanyak 45% responden mengatakan bahwa mereka memiliki pekerjaan yang lebih penting ketika pemilu Gubernur tahun 2010 tersebut diselenggarakan. Disini terlihat bahwa faktor-faktor penyebab *non-voter* memang disebabkan cukup banyaknya masyarakat yang memiliki pekerjaan yang lebih penting ketika pemilu diselenggarakan.

Selanjutnya masyarakat Belakang Tangsi sebagian besar sudah mengetahui bahwa akan adanya pemilukada Gubernur Sumatera Barat yang akan dilaksanakan, persentase responden yang mengetahui akan diadakannya pemilukada Gubernur adalah 100% dan dari informasi pemilukada terlihat bahwa informasinya telah diketahui oleh masyarakat dan hal ini bukanlah faktor yang akan mempengaruhi masyarakat Belakang Tangsi untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena mereka mengetahui bahwa akan dilaksanakannya pemilukada.

Dari faktor layak atau tidaknya calon Gubernur yang akan mencalonkan diri sepertinya juga tidak mempengaruhi responden yaitu masyarakat Belakang Tangsi untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 21% masyarakat yang mengatakan bahwa calon Gubernur itu tidak layak untuk mencalonkan diri sedangkan 79% masyarakat mengatakan bahwa calon tersebut layak untuk mencalonkan diri pada pemilukada Gubernur Sumatera Barat tahun 2010.

Dari faktor selanjutnya masyarakat yang mengatakan memilih ataupun tidak memilih dalam pemilukada tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupannya juga tidak terlihat sebagai penyebab terjadinya ketidak ikutsertaan masyarakat dalam pemilukada Gubernur Tahun 2010. Sebanyak 31% responden yang mengatakan pemilukada tidak akan berpengaruh terhadap kehidupannya sedangkan 69% responden mengatakan bahwa pemilukada akan berpengaruh terhadap kehidupannya.

Dari faktor calon yang akan dipilih tidak ada yang disukai oleh masyarakat yaitu responden, berdasarkan data yang diperoleh nampaknya tidak akan berpengaruh cukup besar terhadap ketidak ikutsertaan masyarakat dalam

pemberian suara dalam pemilukada Gubernur Sumatera Barat tahun 2010. Sebanyak 14% responden yang mengatakan ketidaksukaannya terhadap calon yang akan dipilih sedangkan 86% responden mengatakan suka terhadap calon yang akan dipilih dalam pemilukada Gubernur.

Dari faktor ketidakikutsertaan masyarakat dalam pemilukada yang berdasarkan memang tidak ingin memilih dalam dirinya dari data yang diperoleh seharusnya masyarakat Belakang Tangsi akan ikut serta dalam pemberian suara pada pemilukada Gubernur Sumatera Barat tahun 2010. Sebanyak 31% responden mengatakan memang tidak akan memilih dalam pemilukada walau mereka telah dianggap sah dalam hukum untuk bisa memberikan hak suaranya, selanjutnya 69% responden mengatakan memang ingin memilih pada pelaksanaan pemilukada yang akan diselenggarakan. Dilihat dari data yang diperoleh semestinya masyarakat Belakang Tangsi akan ikut serta dalam pemberian hak suara dalam pemilukada, akan tetapi pemberian suara oleh masyarakat dalam pemilukada tersebut tidak banyak yang terjadi. Hal ini disebabkan karena masyarakat Belakang Tangsi sebagian besar memiliki pekerjaan yang mereka anggap lebih penting ketika pemilukada Gubernur Sumatera Barat tahun 2010 diselenggarakan.

Dari data yang diperoleh selanjutnya faktor bahwa masyarakat banyak yang sedang berada diluar kota ketika pemilukada diselenggarakan seharusnya masyarakat Belakang Tangsi akan cukup banyak yang ikut serta dalam pemberian suara pada pemilukada Gubernur Sumatera Barat tahun 2010. Sebanyak 31% masyarakat yaitu responden yang mengatakan sedang berada di luar kota sedangkan 69% responden mengatakan mereka tidak pergi keluar kota ketika

pemilukada Gubernur diselenggarakan. Dilihat dari data yang diperoleh semestinya sebagian besar masyarakat Belakang Tangsi akan ikut serta dalam pemberian hak suara dalam pemilukada, akan tetapi pemberian suara oleh masyarakat dalam pemilukada tersebut tidak terjadi. Hal ini disebabkan karena masyarakat Belakang Tangsi sebagian besar memiliki pekerjaan yang mereka anggap lebih penting yang mengakibatkan masyarakat sebagian besar tidak memberikan hak suaranya dalam pemilukada Gubernur Sumatera Barat tahun 2010 di TPS-TPS yang telah disebar di Kelurahan Belakang Tangsi.



## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor penyebab *non-voter* masyarakat di Kelurahan Belakang Tangsi pada pemilukada Provinsi tahun 2010, sebagaimana yang telah dipaparkan dari bab demi bab baik itu pada penelitian terdahulu, kerangka teori dan analisis data yang telah peneliti lakukan berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada penelitian ini dari data yang didapat peneliti memang terbukti bahwa penyebab terbesar masyarakat Kelurahan Belakang Tangsi tidak memberikan hak pilih suaranya pada pemilukada Gubernur tahun 2010 disebabkan masyarakat memiliki pekerjaan yang mereka anggap lebih penting ketika pemilukada diselenggarakan. Hal inilah yang kemudian yang menyebabkan masyarakat Belakang Tangsi sebagian besar menjadi masyarakat *non-voter*.
2. Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa terdapat 45% responden yang mengatakan memiliki pekerjaan yang mereka anggap lebih penting dan sebanyak 55% mengatakan tidak adanya pekerjaan yang lebih penting ketika pemilukada Gubernur tahun 2010 diselenggarakan.

3. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa perilaku memilih masyarakat Kelurahan Belakang Tangsi khususnya responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini angka ketidakhadirannya dalam pemilukada cukup tinggi. Dari data yang diperoleh faktor yang banyak menyebabkan masyarakat Kelurahan Belakang Tangsi tidak datang untuk memberikan hak pilih suaranya ke TPS yang ada, hal ini disebabkan cukup banyaknya masyarakat yang mengatakan bahwa mereka memiliki pekerjaan yang mereka anggap lebih penting ketika pemilukada diselenggarakan.

Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang memilih atau tidak memilih ketika merunut kepada fenomena yang ada di Kelurahan Belakang tangsi yaitu tingginya angka ketidakhadiran masyarakat dalam hal memberikan hak pilihnya dalam pemilukada disebabkan masyarakat memiliki pekerjaan yang mereka anggap lebih penting. Kalau dilihat dari fenomena banyaknya masyarakat yang tidak memilih disebabkan mereka memiliki pekerjaan yang lebih penting ketika pemilukada diselenggarakan hal ini dapat dikaitkan dengan faktor latar belakang sosial ekonomi.

Disini disebutkan bahwa para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu atau pemilukada cukup tinggi. Dalam hasil penelitian yang didapat oleh peneliti, diperoleh data bahwa cukup banyaknya masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan masyarakat memiliki pekerjaan yang mereka anggap lebih penting ketika pemilukada diselenggarakan.

Dengan hal pekerjaan, ini seolah sama halnya dengan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan yaitu uang. Masyarakat merasa pekerjaannya menyangkut pendapatan lebih penting ketika pemilukada diselenggarakan.

## 7.2. Saran

Dari kesimpulan yang ada mengenai faktor-faktor penyebab *non-voter* masyarakat Kelurahan Belakang Tangsi pada pemilukada Gubernur tahun 2010, maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pendataan yang lebih teliti tentang daftar pemilih tetap (DPT) ketika pemilu dan pemilukada diselenggarakan agar tidak banyak lagi terjadi masyarakat yang telah mempunyai hak pilihnya tidak bisa memberikan hak pilihnya yang disebabkan tidak terdaftarnya nama-nama mereka di daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini ditujukan kepada KPU dan KPUD yang notabene adalah lembaga penyelenggara pemilu, agar bekerja secara profesional dan teliti agar berjalannya pemilu dan pemilukada secara baik di dalam penyelenggaraannya.
2. Perlu dilakukannya sosialisai yang berkesinambungan kepada masyarakat baik itu dari KPU, KPUD serta tokoh-tokoh masyarakat yang berkompeten bahwasanya pemilu ataupun pemilukada itu sangat penting untuk keperluan mereka sendiri. Dengan asumsi yang

mendasari bahwa masyarakat harus mempunyai partisipasi politik, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang apa yang paling baik untuk dirinya, karena pada akhirnya keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan mempengaruhi secara langsung kehidupan mereka.



## Daftar Pustaka

### Buku Teori :

- Asfar, Muhammad. 1998. "Perilaku *Non-voting* Dibawah Sistem Politik Hegemoni". Yogyakarta : *Thesis* Program Studi Ilmu Politik. Universitas Gajah Mada.
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Bungin, Burhan.(ed.). 2003. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Penerbit Rajawaliipers.
- Devinne, Fiona, 1995 *Qualitative Methods*, dalam *Theory and Methods in Political Science*, David Marsh dan Gerry Stoker, London, Mac Millan Press LTD.
- Haris, Syamsuddin. *Pemilu dan Kesiapan Masyarakat Sipil*. makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "*Kesiapan Masyarakat Sipil Menyongsong Pemilu 2004*" diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Novotel-Bukittinggi, Sumbar tanggal 16 Oktober 2003.
- Hoogerwerf, Prof.Dr.A. 1985. *Politikologi Pengertian dan Problem problemnya.*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mardalis, Drs. 1993. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mas'oed, Mohtar dan Colin MacAndrews. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Jakarta : Gaja Mada University Press.
- Moleong, Lexi. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. 1997. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Sanit, Arbi. 1992. *Aneka Pandangan Fenomena Golput*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Sarundajang. 2005. *Pilkada Langsung Problema dan Prospek*. Jakarta : Kata Hasta Pustaka.

Singarimbun, Masri (ed.). 1987. *Metode Penelitian Survai*. Yogyakarta : LP3ES.

Surbakti, Ramlan. 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Widraswara Indonesia.

Kota Padang Dalam Angka

Bambang, Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lisa, Harison. 2007. *Metode Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana

Mallo, Manase. 1987. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kurnia

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006

Masri, Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta;.LP3ES

Nugroho, dkk. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: AndiYogyakarta

Sumadi, Suryabrata. 2000. *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada

**Website :**

<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=644>

<http://www.idea.int/vt/country-view.efm>

<http://www.idea.int/vt/survey/voterturnout1cfm>

<http://alfside.wordpress.com/2008/10/28/pengertian-kuisoner/>

**Pengantar Angket (Kuesioner)**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NON-VOTER MASYARAKAT DI  
KELURAHAN BELAKANG TANGSI PADA PEMILUKADA PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

Kepada  
Bapak/Ibu Responden  
Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan skripsi di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan, maka saya mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengisi angket yang telah disediakan.

Angket ini bukan tes psikologi atau semacamnya, maka dari itu Bapak/Ibu tidak perlu ragu-ragu atau takut dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Artinya semua jawaban yang di minta adalah sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu rasakan selama ini.

Setiap jawaban yang Bapak/Ibu berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Padang, Mei 2011  
Hormat saya,

Tanda Tangan Responden

Agung Gunandra

**Berilah tanda ( X ) atau ( √ ) pada kolom pilihan jawaban responden.**

**A. Identitas Responden**

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Nama	
2.	Umur	1. < 17 Tahun 2. 18-23 Tahun 3. 24-29 Tahun 4. 30-35 Tahun 5. 36-41 Tahun 6. > 42 Tahun
3.	Jenis Kelamin	7. Laki-laki 8. Perempuan
4.	Agama	1. Islam 2. Kristen Protestan 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghucu 7. lainnya .....

6.	Suku Bangsa	1. Minang 2. Jawa 3. Batak/Tapanuli 4. Melayu 5. Tionghoa 6. Sunda 7. Bugis 8. Lainnya .....
7.	Status Perkawinan	1. Belum Menikah 2. Sudah Menikah 3. Sudah berpisah/cerai
8.	Tempat Tinggal	a. Rumah sendiri b. Rumah kontrakan c. Kost

### B. Situasi Pemilu

1. Apakah Bapak/Ibu ikut memilih pada pemilihan umum kepala daerah provinsi sumatera barat pada tahun 2010 ?
  - a. Ya (stop)
  - b. Tidak
2. Apakah Bapak/Ibu tidak ikut memilih karena tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
3. Apakah Bapak/Ibu tidak ikut memilih karena tidak tahu adanya pemilukada Provinsi sumatera barat tahun 2010 ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
4. Apakah Bapak/Ibu tidak ikut memilih karena para calon gubernur tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin di Sumatera Barat ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
5. Apakah Bapak/Ibu tidak ikut memilih karena beranggapan bahwa memilih atau tidak ikut memilih tidak membawa perubahan terhadap kehidupan?
  - a. Ya
  - b. Tidak
6. Apakah Bapak/Ibu tidak ikut memilih karena calon yang akan dipilih tidak ada yang sukai ?
  - a. Ya
  - b. Tidak

7. Apakah Bapak/Ibu tidak ikut memilih karena memang tidak ingin memilih ?
- Ya
  - Tidak
8. Apakah Bapak/Ibu tidak ikut memilih karena pada saat pemilihan sedang dalam keadaan sakit ?
- Ya
  - Tidak
9. Apakah Bapak/Ibu tidak ikut memilih karena pada saat pemilihan keluarga atau kerabat sedang dalam keadaan sakit ?
- Ya
  - Tidak
10. Apakah Bapak/Ibu tidak ikut memilih karena ada pekerjaan lain yang lebih penting yang bertepatan dengan hari pemilukada tersebut ?
- Ya
  - Tidak
11. Apakah Bapak/Ibu tidak ikut memilih karena pada saat pemilihan sedang berada di luar kota ?
- Ya
  - Tidak
12. Apakah Bapak/Ibu tidak ikut memilih karena pada saat pemilihan cuaca sedang buruk (hari hujan, badai) ?
- Ya
  - Tidak

**C. Sistem Politik**

13. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan penerapan sistem demokrasi di Indonesia saat ini?
- Ya
  - Tidak
14. Apakah Bapak/Ibu puas dengan berjalannya sistem demokrasi di Indonesia saat ini?
- Sangat puas
  - Kurang puas
  - Tidak puas
15. Apakah Bapak/Ibu tahu adanya lembaga Eksekutif (Seperti Presiden dan para menteri) ?
- Tahu
  - Tidak tahu

16. Apakah Bapak/Ibu tahu adanya lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) ?
- Tahu
  - Tidak tahu
17. Apakah Bapak/Ibu tahu adanya lembaga Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) ?
- Tahu
  - Tidak tahu
18. Apakah Bapak/Ibu tahu siapa nama presiden Republik Indonesia saat ini ?
- Tahu
  - Tidak tahu
19. Apakah Bapak/Ibu tahu siapa nama Gubernur Provinsi Sumatera Barat saat ini ?
- Tahu
  - Tidak tahu
20. Apakah Bapak/Ibu tahu siapa nama Wali Kota di Kota Padang saat ini ?
- Tahu
  - Tidak tahu
21. Apakah Bapak/Ibu tahu siapa nama Camat pada kecamatan Padang Barat saat ini ?
- Tahu
  - Tidak tahu
22. Apakah Bapak/Ibu tahu siapa nama Lurah pada Kelurahan Belakang Tangsi saat ini ?
- Tahu
  - Tidak tahu

**D. Identifikasi Kepartaian dan Kandidat**

23. Apakah Bapak/Ibu tertarik dengan permasalahan-permasalahan politik?
- Sangat tertarik
  - Kurang tertarik
  - Tidak tertarik
24. Apakah Bapak/Ibu menjadi anggota aktif dalam partai politik tertentu ?
- Ya
  - Tidak (**Lanjut ke pertanyaan 29**)
25. Apakah Bapak/Ibu merasa dekat dengan partai politik tertentu ?
- Ya
  - Tidak

26. Apakah Bapak/Ibu tahu mengenai program kerja dari partai politik tersebut ?
- Ya, sebutkan.....
  - Tidak
27. Apakah Bapak/Ibu tahu kinerja dari partai politik tersebut ?
- Ya, sebutkan.....
  - Tidak
28. Apakah Bapak/Ibu tahu mengenai visi dan misi dari partai politik tersebut ?
- Ya
  - Tidak
29. Apakah menurut Bapak/Ibu kegiatan politik adalah kegiatan yang kotor ?
- Ya
  - Tidak
30. Apakah Bapak/Ibu tidak percaya terhadap adanya partai politik?
- Percaya
  - Kurang percaya
  - Tidak percaya sama sekali

**E. Kepercayaan Politik**

31. Apakah Bapak/Ibu percaya terhadap pemilukada tersebut?
- Ya
  - Tidak
32. Apakah Bapak/Ibu percaya terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)?
- Ya
  - Tidak
33. Apakah Bapak/Ibu percaya terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)?
- Ya
  - Tidak
34. Apakah Bapak/Ibu percaya terhadap Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)?
- Ya
  - Tidak
35. Apakah Bapak/Ibu tidak percaya terhadap calon-calon yang mencalonkan diri pada pemilukada tersebut ?
- Ya
  - Tidak
36. Apakah menurut Bapak/Ibu calon-calon yang mencalonkan diri tidak dipilih secara demokrasi ?
- Ya
  - Tidak

37. Apakah menurut Bapak/Ibu Pemilikada hanya menghabiskan uang rakyat ?
- Ya
  - Tidak
  - Tidak tahu

**F. Status Sosial-Ekonomi**

38. Apakah pendidikan terakhir Bapak/Ibu ?

- Tidak Pernah Sekolah
- Tamat SD/ sederajat
- Tamat SLTP/ sederajat
- Tamat SLTA/ sederajat
- Tidak tamat perguruan tinggi/ masih mahasiswa
- Tamat D3/ diploma
- Tamat S-1 atau lebih tinggi

39. Apakah pekerjaan Bapak/Ibu saat ini?

- Petani
- Buruh
- Pedagang/ Pengusaha
- Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Pegawai kelurahan
- Guru/dosen
- Karyawan swasta
- Ibu Rumah Tangga
- Nelayan
- Masih sekolah/kuliah
- Peternak
- Belum dapat pekerjaan
- Lainnya.....

40. Berapakah penghasilan kotor rumah tangga Bapak/Ibu per bulannya?

- Dibawah 400 ribu
- 400-599 ribu
- 600-799 ribu
- 800-999 ribu
- 1-1,5 juta
- 2-3,5 juta
- Diatas 4 juta

41. Berapakah pengeluaran kotor rumah tangga Bapak/Ibu per bulannya?

- Dibawah 400 ribu
- 400-599 ribu
- 600-799 ribu
- 800-999 ribu
- 1-1,5 juta
- 2-3,5 juta
- Diatas 4 juta



DAFTAR PENGGUNAAN HAK PILIH PEMILUKADA GUBERNUR  
KOTA PADANG TAHUN 2010

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR	PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH	TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	% MENGGUNAKAN HAK PILIH	% TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
1	Padang Barat	34.739	17.410	17.329	50.12%	49.88%
2	Padang Utara	38.165	19.753	18.412	51.75%	48.25%
3	Padang Timur	55.753	28.886	26.867	51.81%	48.19%
4	Padang Selatan	42.143	22.201	19.942	52.68%	47.32%
5	Bungus Teluk Kabung	14.659	9.189	5.470	62.68%	37.32%
6	Koto Tengah	109.816	59.624	50.192	54.29%	45.71%
7	Nanggalo	37.652	20.362	17.290	54.07%	45.93%
8	Lubuk Kilangan	32.376	17.932	14.444	55.38%	44.62%
9	Lubuk Begalung	70.557	40.210	30.347	56.98%	43.02%
10	Kuranji	82.018	45.416	36.602	55.37%	44.63%
11	Pauh	25.941	19.003	16.938	73.25%	26.75%
<b>TOTAL</b>		553.819	299.986	253.833		

Data sekunder diperoleh dari kantor KPUD Kota Padang

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



UNIVERSITAS PADJARAN

**DAFTAR PENGGUNAAN HAK PILIH PEMILUKADA GUBERNUR KELURAHAN DI KECAMATAN PADANG  
BARAT TAHUN 2010**

<b>NO</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>DAFTAR PEMILIH TETAP</b>	<b>PEMILIH MENGUNAKAN HAK PILIH</b>	<b>TIDAK MENGUNAKAN HAK PILIH</b>	<b>% MENGUNAKAN HAK PILIH</b>	<b>% TIDAK MENGUNAKAN HAK PILIH</b>
1	Flamboyan Baru	3.020	1.698	1.322	56.23%	43.77%
2	Rimbo Kaluang	2.558	1.398	1.160	54.66%	45.34%
3	Ujung Gurun	3.122	1.829	1.293	58.59%	41.41%
4	Purus	4.531	2.702	1.829	59.64%	40.36%
5	Padang Pasir	3.206	1.631	1.575	50.88%	49.12%
6	Olo	3.933	2.023	1.910	51.44%	48.56%
7	Kampung Jao	3.051	1.443	1.608	47.30%	52.70%
8	Belakang Tangsi	2.499	960	1.539	38.42%	61.58%
9	Kampung Pondok	4.088	1.714	2.374	41.93%	58.07%
10	Berok Nipah	4.731	20.12	2.719	42.53%	57.47%
<b>TOTAL</b>		<b>34.739</b>	<b>17.410</b>	<b>17.329</b>		

Data sekunder diperoleh dari kantor KPUD Kota padang

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA